



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 114 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN MOYO HILIR
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa rencana strategis perangkat daerah merupakan dokumen rencana pembangunan lima tahunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan yang disusun selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rencana strategis perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Moyo Hilir Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 85 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 271, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7022);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 730);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN MOYO HILIR TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sumbawa.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Tujuan adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD.
10. Sasaran adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra-PD.
11. Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra-PD.
12. Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra-PD.
13. Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
14. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.
15. Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran, hasil, dan dampak).

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Renstra-PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun yang menjabarkan:
 - a. visi, misi dan program Bupati dan Wakil terpilih; dan
 - b. Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan program Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan, disertai dengan kerangka pendanaan.

- (2) Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 serta memperhatikan:
 - a. kajian lingkungan hidup strategis; dan
 - b. Isu Strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Tahun 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, serta Renstra K/L Tahun 2025-2029.

Pasal 3

- (1) Renstra-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman penyusunan Renja-PD, serta dokumen perencanaan terkait lainnya.
- (2) Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, program, kegiatan, subkegiatan, serta pagu indikatif anggaran dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Sistematika Renstra-PD meliputi:

BAB I : Pendahuluan;

BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;

BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan;

BAB IV : Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan

BAB V : Penutup.

- (2) Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PERUBAHAN RENSTRA-PD

Pasal 5

- (1) Perubahan Renstra-PD dilakukan apabila terjadi perubahan terhadap RPJMD.
- (2) Perubahan Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 94 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 97 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 94 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 Nomor 97), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.



Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 30 Oktober 2025

BUPATI SUMBAWA,

SYARAFUDDIN JAROT

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 31 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA.



BUDI PRASETIYO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2025 NOMOR 114

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 114 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN
MOYO HILIR TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah sebagai pedoman (*guidance*) dalam penentuan kebijakan dan perencanaan. Dokumen ini juga menunjukkan peranan Kecamatan Moyo Hilir dalam menopang upaya pencapaian visi dan misi Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) pada periode pemerintahan tahun 2025-2029. Renstra Kecamatan Moyo Hilir ini disusun dengan berpedoman kepada arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2025.

Penyusunan Renstra Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029 mempertimbangkan berbagai kondisi yang memengaruhi perekonomian daerah, sehingga pilihan kebijakan dan strategi yang dirumuskan dalam Renstra ini diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan, khususnya di bidang urusan pemerintahan Kecamatan. Penyusunan Renstra ini juga mempertimbangkan potensi dan masalah yang berkenaan urusan pemerintahan Kecamatan, serta isu strategis pembangunan, baik global, nasional, regional maupun lokal. Pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya (tahun 2020-2024), Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa capaian kinerja baik indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci serta indikator kinerja lainnya menunjukkan dalam capaian yang baik yang berdampak signifikan bagi dinamika pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Sumbawa.

Penyusunan Renstra Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 merupakan salah satu instrumen strategis dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Sumbawa. Dokumen perencanaan ini disusun untuk merumuskan kebijakan, strategi dan program/kegiatan/subkegiatan Kecamatan Moyo Hilir yang komprehensif, terukur, dan berkelanjutan guna mewujudkan keunggulan sumberdaya pembangunan, kemajuan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dapat diakselerasi melalui optimalisasi pelaksanaan urusan Kecamatan. Dokumen Renstra ini merupakan wujud dari komitmen dalam mengintegrasikan aspirasi dan kebutuhan semua tingkatan pemerintahan (nasional, provinsi dan daerah) ke dalam kebijakan, strategi dan program pembangunan yang sinergis dan operasional sampai pada uraian kegiatan/subkegiatan.

Pendekatan teknokratik dalam penyusunan Renstra Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 mencakup pengintegrasian data empiris, evaluasi kinerja, serta analisis mendalam terhadap kondisi

umum Kecamatan Moyo Hilir, sehingga setiap kebijakan, strategi dan program pembangunan yang dirumuskan dapat diimplementasikan secara realistis dan terukur. Pendekatan ini diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan sinergi antar Kecamatan Moyo Hilir dan antara tingkatan pemerintah.

Selain berkaitan dengan proses penyusunan dokumen perencanaan dalam Kecamatan Moyo Hilir itu sendiri, Renstra Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa ini juga memiliki hubungan dan keterkaitan dengan proses penyusunan dokumen perencanaan daerah Kabupaten Sumbawa, proses penyusunan dokumen perencanaan organisasi Kecamatan Moyo Hilir provinsi terkait, serta proses perencanaan pembangunan secara nasional yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga teknis terkait. Dengan demikian, Renstra sebagai dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa, akan terkait dengan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan itu sendiri, serta terkait pula dengan dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten Sumbawa yaitu RPJMD dan RPJPD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renstra Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa dalam upaya memastikan akuntabilitas, transparansi, dan sinkronisasi antara kebijakan pembangunan nasional, provinsi dan daerah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4. Undang-Undang Nomor 85 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 641) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 694);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2045;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029; dan
17. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 43 Tahun 2024 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sumbawa.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 adalah untuk menyediakan pedoman dalam mengarahkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan sesuai situasi dan kondisi yang ada pada urusan kecamatan, dunia usaha maupun masyarakat dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan wilayah sesuai dengan visi dan misi pembangunan yang ditetapkan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa periode 2025-2029.

Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, program pembangunan, subkegiatan serta indikator kinerja pembangunan sesuai dengan situasi dan kondisi Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa.
2. Menyediakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa, serta perencanaan penganggaran.
3. Menjamin terwujudnya keterpaduan dan sinergitas antara perencanaan pembangunan Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa dengan perencanaan pembangunan Kecamatan Moyo Hilir,

- perencanaan pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan perencanaan pembangunan nasional.
4. Landasan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Kecamatan Moyo Hilir.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I ini terdiri atas 4 (empat) subbab sebagai berikut: (1) Latar Belakang, Landasan Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan, serta sistematika ; (2) Dasar Hukum, yang mengidentifikasi regulasi yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra Tahun 2025-2029; (3) Maksud dan Tujuan, menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029; (4) Sistematika Penyusunan, menjelaskan susunan sistematis penulisan dan uraian singkat masing-masing bab dalam Renstra Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN MOYO HILIR

Pada Bab II ini terdiri dari gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis pada Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa, yang diuraikan secara rinci dalam 2 (dua) subbab sebagai berikut :

1. Gambaran Umum Pelayanan Kecamatan Moyo Hilir

Pada subbab ini disajikan data dan informasi terkait pelaksanaan urusan kecamatan, serta hasil evaluasi capaian pelaksanaannya dalam 5 (lima) tahun terakhir. Konten pokok pada subbab ini memuat tinjauan Kecamatan Moyo Hilir meliputi: (1) Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Moyo Hilir; (2) Sumber Daya Kecamatan Moyo Hilir; (3) Kinerja Pelayanan Kecamatan Moyo Hilir (Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Kunci dan kinerja lainnya); (4) Kelompok Sasaran Pelayanan Kecamatan Moyo Hilir; dan (5) Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan.

2. Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Moyo Hilir

Pada subbab ini menguraikan identifikasi permasalahan yang dirumuskan dari Bab II Renstra Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 ataupun hasil penjangkaran aspirasi yang berkaitan dengan pengelolaan/pelayanan Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa. Pada subbab ini juga menguraikan identifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional dan regional) yang dapat mempengaruhi Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa baik secara langsung ataupun tidak langsung.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada Bab III terdiri dari tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 berdasarkan NSPK dan sasaran RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029. Selain itu, pada

Bab ini juga disajikan strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029, termasuk pentahapan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENG-GARAAN BIDANG URUSAN

Pada Bab IV ini memuat uraian program, kegiatan dan subkegiatan sebagai hasil cascading dari tujuan, sasaran, output dan outcome yang mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif masing-masing. Pada Bab ini juga disajikan uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Moyo Hilir, serta target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

Pada Bab V terdiri dari kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
KECAMATAN MOYO HILIR

2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Moyo Hilir

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Moyo Hilir

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 43 Tahun 2024 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sumbawa, Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Dalam melaksanakan peran tersebut, Kecamatan Moyo Hilir dipimpin oleh Camat yang memiliki tugas mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik serta pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.

Dalam menjalankan tugas, Camat dibantu oleh Perangkat Kecamatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat yaitu:

- 1. Sekretaris Kecamatan;
- 2. Terdapat 4 (Empat) Kepala Seksi yaitu:
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan.
 - b. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban.
 - c. Kepala Seksi Pelayanan.
 - d. Kepala Seksi Pemberdayaan masyarakat.

Uraian tugas dan fungsi Kecamatan disajikan pada Tabel 2.1 berikut.
Tabel 2.1 Tugas dan Fungsi Kecamatan

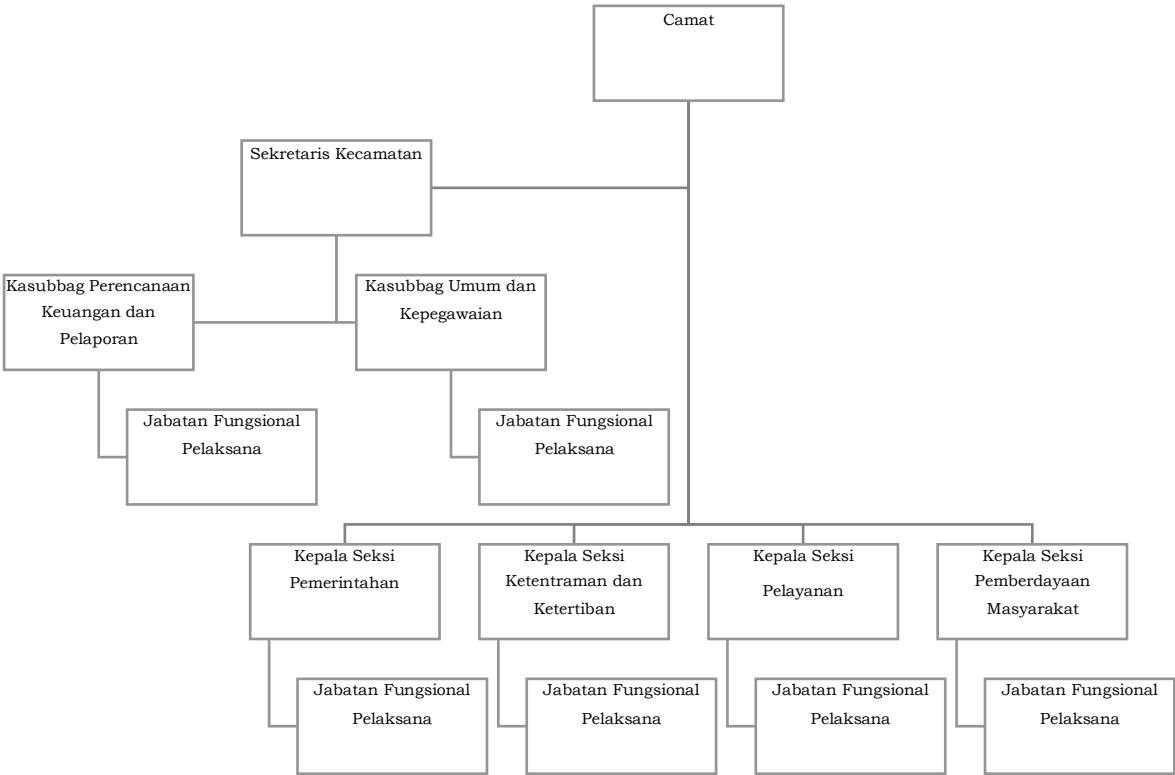
No	Jabatan	Tugas	Rincian Tugas
1	Camat	Mengoordinasikan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik serta Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum; b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan; h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan i. Melaksanakan Tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan

			perundang-undangan.
2	Sekretaris Kecamatan	Merumuskan, mengoordinasikan dan melaksanakan program penunjang urusan pemerintahan Kecamatan	a. Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja kecamatan b. Kegiatan administrasi keuangan pada Kecamatan c. Kegiatan Administrasi barang milik daerah pada Kecamatan d. Kegiatan administrasi kepegawaian pada Kecamatan e. Kegiatan administrasi Umum pada Kecamatan f. Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah di tingkat kecamatan g. Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan di tingkat kecamatan h. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan i. Tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
3	Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Melaksanakan kegiatan dan sub kegiatan terkait dengan perencanaan, keuangan dan pelaporan kecamatan	a. Melaksanakan kegiatan dan sub kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja kecamatan b. Melaksanakan kegiatan dan sub kegiatan administrasi keuangan kecamatan; dan c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
4	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Melaksanakan kegiatan dan sub kegiatan terkait dengan urusan umum dan kepegawaian kecamatan	a. Melaksanakan kegiatan dan sub kegiatan administrasi barang milik daerah pada kecamatan b. Melaksanakan kegiatan dan sub kegiatan administrasi kepegawaian pada kecamatan c. Melaksanakan kegiatan dan sub kegiatan administrasi umum pada kecamatan d. Melaksanakan kegiatan dan sub kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah di tingkat kecamatan e. Melaksanakan kegiatan dan sub kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan di tingkat kecamatan f. Melaksanakan kegiatan dan sub

			kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
5	Kepala Seksi Pemerintahan	Merumuskan, mengoordinasikan dan melaksanakan : a. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan; dan b. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	a. Melaksanakan kegiatan dan sub kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai Penugasan Kepala Daerah b. Melaksanakan kegiatan dan sub kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa; dan c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
6	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Merumuskan, mengoordinasikan dan melaksanakan program ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan	a. Melaksanakan kegiatan dan sub kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan b. Melaksanakan kegiatan dan sub kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di tingkat kecamatan; dan c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
7	Kepala Seksi Pelayanan	Merumuskan, mengoordinasikan dan melaksanakan program pemerintahan dan pelayanan public di tingkat kecamatan	a. Melaksanakan kegiatan dan sub kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan b. Melaksanakan kegiatan dan sub kegiatan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan c. Melaksanakan kegiatan dan sub kegiatan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum d. Melaksanakan kegiatan dan sub kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat; dan e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
8	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Merumuskan, mengoordinasikan dan melaksanakan program	a. Melaksanakan kegiatan dan sub kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa dan kelurahan

		pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	b. Melaksanakan kegiatan dan sub kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan c. Melaksanakan kegiatan dan sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
--	--	--	---

Struktur organisasi Kecamatan Moyo Hilir adalah sebagai berikut.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam mengemban tugas dan fungsinya, Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa ditunjang oleh sumber daya manusia yang tersebar di unit kerja yang ada. Karakteristik Sumber Daya Manusia Aparatur Kecamatan Moyo Hilir terdiri dari pegawai ASN dan pegawai Non-ASN (Honorar). Karakteristik pegawai Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa disajikan pada Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2. 2 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Umur pada Kecamatan Kabupaten Sumbawa Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah ASN	21	21	20	22	19
2.	Jumlah Pegawai Non ASN	3	3	3	3	3
3.	Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin:					
	Laki-Laki	20	20	19	20	17
	Perempuan	1	1	1	2	2
4.	Jumlah Non-ASN Berdasarkan Jenis Kelamin:					
	Laki-Laki	3	3	3	3	3
	Perempuan	0	0	0	0	0
5.	Jumlah Pegawai ASN Berdasarkan Umur:					
	Usia 25-29 tahun	0	0	0	0	0
	Usia 30-34 tahun	0	0	0	5	0
	Usia 35-39 tahun	5	5	1	0	0
	Usia 40-44 tahun	3	3	7	4	8
	Usia 45-49 tahun	3	3	3	4	3
	Usia 50-54 tahun	3	3	4	4	4
	Usia 55-59 tahun	7	7	5	5	4

Sumber : Data diolah

Berdasarkan Tabel 2. 2, pegawai Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa dalam 5 tahun terakhir (2020-2024) terdiri atas pegawai ASN sekitar 80 persen dan non ASN sekitar 20 persen. Tampak bahwa pegawai ASN memiliki proporsi yang besar dalam mendukung pelaksanaan tugas pada Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa.

Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin, menunjukkan bahwa selama tahun 2020-2024 proporsi pegawai laki-laki lebih besar dari pegawai perempuan.

Dari sisi umur, SDM ASN Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Tahun 2024, proporsi terbesar berada pada usia 55-59 tahun atau 33 persen. Sedangkan usia 50-54 tahun sebesar 26 persen, usia 45-49 tahun sebesar 20 persen, usia 40-444 tahun sebesar 12 persen, dan usia 35-39 tahun sebesar 6 pesen.

Kualifikasi pendidikan ASN (PNS dan PPPK) dan non ASN Kecamatan Moyo Hilir, disajikan pada Tabel 2.3 berikut.

Tabel 2. 3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan pada Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Pegawai ASN Berdasarkan Pendidikan:					
	SMP-SMA Sederajat	12	12	11	13	11
	Diploma (D1-D3)	0	0	0	0	0
	S1	9	9	10	9	8
	S2	0	0	0	0	0
	S3	0	0	0	0	0

2.	Jumlah Pegawai No-ASN Berdasarkan Pendidikan:					
	SMP-SMA Sederajat					
	Diploma (D1-D3)					
	S1	3	3	3	3	3
	S2	0	0	0	0	0
	S3	0	0	0	0	0

Sumber : Data diolah

Berdasarkan Tabel 2.3 diketahui bahwa tingkat pendidikan pegawai pada Kecamatan Moyo Hilir, baik ASN maupun non ASN, paling banyak adalah pegawai dengan tingkat pendidikan S1 yaitu lebih dari 40 persen, sehingga menjadi sumber daya potensial dalam menggerakkan pelaksanaan tugas perangkat daerah. Kondisi tahun 2024, jumlah pegawai 19 orang ASN (PNS dan PPPK) dengan komposisi S1 mencapai 40%, selanjutnya SMA sebesar 60%. Selain itu, dalam menjalankan tugasnya, Kecamatan Moyo Hilir juga didukung oleh 3 orang tenaga No-ASN (Honorar) dengan komposisi S1 sebesar 100%.

Distribusi pegawai berdasarkan unit kerja pada Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa per 31 Desember Tahun 2024 disajikan pada Tabel 2.4 berikut.

Tabel 2. 4 SDM Berdasarkan Status Kepegawaian pada Kantor Camat Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Tahun 2024

No	Bidang	Jumlah PNS (Orang)	Jumlah Tenaga Non ASN (Orang)	Jumlah Total (Orang)
1	Sekretariat	4	1	5
2	Seksi Pemerintahan	3	0	3
3	Seksi Pelayanan	6	2	8
4	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	2	0	2
5	Pemberdayaan masyarakat	4	0	4
Jumlah		19	3	22

Sumber : Data diolah

2.1.2.2 Sumber Daya Sarana Prasarana Perangkat Daerah

1. Inventaris Tanah

Daftar inventaris tanah sesuai Kartu Inventaris Barang (KIB) Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa disajikan pada Tabel 2.5 berikut.

Tabel 2. 5 Daftar Inventaris Tanah Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Tahun 2024

No	Jenis Barang	Luas (M2)	Tahun	Lokasi/Letak	Status	Penggunaan	Asal Usul*)
----	--------------	-----------	-------	--------------	--------	------------	-------------

No	Jenis Barang	Luas (M2)	Tahun	Lokasi/Letak	Status	Penggunaan	Asal Usul*)
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2.608	2012	Desa Moyo Hilir Kecamatan Moyo Hilir	Hak Pakai	Kantor Camat	Pembelian
2	Tanah Bangunan Gudang	1.375	2012	Desa Moyo Hilir Kecamatan Moyo Hilir	Hak Pakai	eks rumah dinas camat moyo hilir	Pembelian

Sumber: Kartu Inventaris Tanah dan Bangunan Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa, Tahun 2024.

Berdasarkan daftar inventaris Barang Milik Daerah, maka kategori tanah di atas menjadi sumberdaya yang digunakan untuk optimalisasi pelayanan perangkat daerah Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa.

2. Inventaris Peralatan dan Mesin

Adapun sumberdaya peralatan dan mesin sebagai pendukung pelaksanaan tugas Kecamatan Moyo Hilir disajikan pada Tabel 2.6 berikut.

Tabel 2.6 Daftar Inventaris Peralatan dan Mesin Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Tahun 2024

No	Jenis Barang>Nama Barang	Merk/Type	Tahun Pembelian	Asal Usul
1	Terali	Besi	2010	Pembelian
2	Lemari Arsip 2 pintu	Olympic	2011	Pembelian
3	Lemari Arsip 2 pintu	Olympic	2012	Pembelian
4	Lemari Arsip 2 Pintu	Besi	2012	Pembelian
5	Lemari Besi/Metal	Brother	2021	Pembelian
6	Lemari Besi/Metal	Imforta	2022	Pembelian
7	Filing Cabinet Besi	Brother	2002	Pembelian
8	Filing Cabinet Besi	Brother	2003	Pembelian
9	Brandkas	National / Satu Pintu	2023	Pembelian
10	LCD Projector/Infocus	Accer Pico C 120	2021	Pembelian
11	Papan Nama Instansi		1985	Pembelian
12	Lemari Arsip 2 Pintu	Olympic	2010	Pembelian
13	Filling Kabinet	Brother	2011	Pembelian
14	Kulkas	Sharp	2011	Pembelian
15	LCD Proyektor	LG	2011	Pembelian
16	Kursi Beroda Pakai Tangan	Front Line	2012	Pembelian
17	Filling Kabinet	Brother	2012	Pembelian
18	Meja Locket	Kayu	2012	Pembelian
19	Kursi Locket	Besi	2012	Pembelian
20	Kursi Tunggu	Kayu	2012	Pembelian
23	Meja 1/2 Biro	Sucitra	2012	Pembelian
24	Meja 1/2 Biro	Expo	2012	Pembelian
25	Meja 1/2 Biro	Panel	2012	Pembelian
26	Kasur/Spring Bed	Central	2016	Pembelian
27	Kursi Tamu	Kayu busa	2018	Pembelian
28	Kursi Tamu	Besi	2018	Pembelian
29	Kursi Tamu	Kayu	2018	Pembelian
30	Kulkas 1 Pintu	Polytron	2018	Pembelian
31	A.C. Split	Polytron	2018	Pembelian
32	A.C. Split	Polytron	2019	Pembelian
33	Polytron	Polytron	2021	Pembelian
34	A.C. Split	Gree	2022	Pembelian

No	Jenis Barang>Nama Barang	Merk/Type	Tahun Pembelian	Asal Usul
35	Kipas Angin	Tornado / Turbo	2024	Pembelian
36	Kompore Gas (Alat Dapur)	Rinnai	2022	Pembelian
37	Televisi	Sharp / 21 Inch	2011	Pembelian
38	Televisi	Polytron / 21 INCHI	2018	Pembelian
39	Televisi	Polytron 32.'	2022	Pembelian
40	Sound System	Polytron	2017	Pembelian
41	Sound System	Road	2022	Pembelian
42	Wireless	Polytron / AC22V	2023	Pembelian
43	Dispenser	Miyako / Panas Dingin	2023	Pembelian
44	Gordyin/Kray	Kain	2022	Pembelian
45	Gordyin/Kray	Kain	2022	Pembelian
46	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Babaneo	2022	Pembelian
47	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	OGGI	2021	Pembelian
48	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	OGGI	2021	Pembelian
49	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Kayu	2021	Pembelian
50	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Kayu	2021	Pembelian
51	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Kayu	2021	Pembelian
52	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Kayu	2021	Pembelian
53	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Lokal/kayu	2023	Pembelian
54	Meja Kerja Pegawai Non Struktural		2015	Pembelian
55	Meja Rapat Pejabat lainnya	Babaneo	2022	Pembelian
56	Meja Kerja Pejabat	Babaneo	2022	Pembelian
57	Kursi Kerja Pejabat	Babaneo	2022	Pembelian
58	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Babaneo	2022	Pembelian
59	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Alvero	2013	Pembelian
60	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Alvero		Pembelian
61	Lemari Buku Arsip	EXPO	2016	Pembelian
62	Lemari Arsip	Imforta	2022	Pembelian
63	UPS	Prolink / Pro L200S	2023	Pembelian
64	Power Supply	E PRO / 450 Watt Ultra	2011	Pembelian
65	Layar Proyektor	Maxtor	2022	Pembelian
66	Komputer PC	pentium III	2002	Pembelian
67	Komputer PC	LG	2017	Pembelian
68	Komputer PC	Lenovo	2022	Pembelian
69	Komputer PC		2022	Pembelian
70	Komputer PC	Asus / All-in-One PC	2023	Pembelian
71	Komputer PC	Axioo / MYPC ONE PRO	2024	Pembelian
72	Lap Top	Asus	2019	Pembelian
73	Note Book	Lenovo	2022	Pembelian
74	Note Book	OTEB00K ACER	2024	Pembelian
75	Printer	EPSON L 120	2017	Pembelian
76	Printer	Epson L 6190	2020	Pembelian
77	Printer	Epson l 3110	2022	Pembelian
78	Printer	Epson L121	2022	Pembelian
79	Station Wagon	aihatsu Xenia AIRBAG R MT DG 1.3 DLX / AIRBAG R MT DG 1.3 DLX	2015	Pembelian

Sumber: Kartu Inventaris Barang Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa, Tahun 2024.

Dari Tabel 2.6 di atas, secara umum terdapat beberapa sarana maupun peralatan kerja yang relatif masih kurang memadai.

3. Inventaris Gedung dan Bangunan

Daftar inventaris Gedung dan Bangunan sesuai Kartu Inventaris Barang (KIB) Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa disajikan pada Tabel 2.7 berikut.

Tabel 2.7 Daftar Inventaris Gedung dan Bangunan Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Tahun 2024

No	Jenis Barang	Luas Lantai (M2)	Status Tanah	Lokasi/Letak	Asal Usul*)	Keterangan
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	340.958		Moyo Hilir	Pembelian	Kantor Camat Moyo Hilir
2	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	169		Moyo hilir	Pembelian	Rumah Dinas Camat Moyo Hilir
3	Pagar Permanen	199		Moyo hilir	Pembelian	Pagar Keliling

Sumber: Kartu Inventaris Gedung dan Bangunan Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa, Tahun 2024.

4. Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan

Daftar inventaris Jalan, Irigasi dan Jaringan sesuai Kartu Inventaris Barang (KIB) Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa disajikan pada Tabel 2. 8 berikut.

Tabel 2. 8 Daftar Inventaris Jalan, Irigasi dan jaringan Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Tahun 2024

No	Jenis Barang	Konstruksi	Status Tanah	Lokasi/Letak	Asal Usul*)	Keterangan
1	Sumur Resapan	Instalasi air		Kantor Camat Moyo Hilir	Pembelian	Jaringan Air Bersih

Sumber: Kartu Inventaris Inventaris Jalan, Irigasi dan jaringan Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Tahun 2024.

5. Aset Tetap Lainnya

Daftar inventaris Aset Tetap lainnya sesuai Kartu Inventaris Barang (KIB) Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa disajikan pada Tabel 2.9 berikut.

Tabel 2.9 Daftar Inventaris Aset Tetap lainnya Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Tahun 2024

No	Jenis Barang	Tahun Cetak/ Pembelian	Jumlah	Asal Usul*)	Keterangan

Sumber: Kartu Inventaris Aset Tetap Lainnya Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Tahun 2024.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.3.1 Jumlah penduduk Kecamatan Moyo Hilir Tahun 2021-2024

Jumlah penduduk Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Tahun 2020-2024 disajikan sebagai berikut.

Tabel 3.0. Jumlah Penduduk Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Tahun 2020-2024

No	Nama	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Desa Serading	Orang	4,675	5.168	5.242	5.285	5.338
2.	Desa Kakiang	Orang	3.052	3.286	3.423	3.421	3.468
3.	Desa Moyo	Orang	2.229	3,010	2.900	3.031	3.146
4.	Desa Poto	Orang	2.809	2.979	2.940	2.980	2.981
5.	Desa Berare	Orang	3.200	3.456	3.488	3.474	3.504
6.	Desa Ngeru	Orang	1.695	2.096	2.148	2.093	2.086
7.	Desa Olat Rawa	Orang	1.679	2.063	2.103	2.154	2.161
8.	Desa Batu Bangka	Orang	2.471	2.844	2.890	2.912	2.952
9.	Desa Moyo Mekar	Orang	1.686	1.785	1.859	1.874	1.851
10.	Desa Lab Ijuk	Orang	1.197	1.274	1.303	1.320	1.338

Sumber: Data BPS Tahun 2020-2024.

2.1.3.2 Indikator Kinerja Utama

Upaya mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Moyo Hilir untuk mencapai postur Perangkat Daerah yang berkinerja tinggi, sebagaimana Renstra Kecamatan Moyo Hilir Tahun 2021-2026 dilakukan dengan berbagai skema. Pencapaian sasaran tersebut dijabarkan ke dalam beberapa tujuan dan sasaran strategis. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2024 disajikan sebagai berikut.

Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	2021	2022	2023	2024
1.	Kategori Predikat Hasil Penilaian AKIP Kecamatan Moyo Hilir	Kategori	-	C	B	CC
2.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	%	-	-	68,35	58,93

Sumber : LKjIP Kecamatan Moyo Hilir tahun 2021-2024

Dari Tabel 3.1 diketahui bahwa capaian Indikator Keinerja Utama (IKU) Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa tahun 2021-2024 rata-rata mencapai target yang ditetapkan. Nilai Kinerja Organisasi Kecamatan Moyo Hilir mencapai rata-rata di atas 100 (sangat tinggi) yang didukung capaian kinerja yang optimal pada semua IKU.

1. Indeks Kepuasan Kualitas Layanan Kecamatan Moyo Hilir

Nilai Indeks Kepuasan Layanan dalam 4 (empat) tahun terakhir secara agregat terus meningkat dan secara kategori berada pada interval kategori yang sama yaitu mutu layanan CC (Baik) dan terakhir tahun 2024 Nilai Indeks Kepuasan Layanan Kecamatan Moyo Hilir 58,93. Jika mengacu pada standar mutu pelayanan dimana kriteria mutu adalah B (Baik), maka realisasi indikator kinerja ini telah sesuai dan berada di atas target. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Adapun kriteria Indeks kepuasan layanan sebagai berikut:

- a. 25,00 – 64,99 : D (Tidak baik)
- b. 65,00 – 76,60 : C (Kurang baik)
- c. 76,61 – 88,30 : B (Baik)
- d. 88,31 – 100,00 : A (Sangat baik)

2. Peningkatan Kategori Nilai SAKIP Kecamatan Moyo Hilir

Nilai SAKIP Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa berdasarkan evaluasi Inspektorat tahun 2024 dengan nilai 62,23 (kriteria B). Pada perspektif perbandingan pemerintahan atasan (provinsi dan nasional) menunjukkan bahwa nilai SAKIP tersebut berada di bawah nilai SAKIP Pemerintah Provinsi NTB yang mencapai kriteria A dan sama dengan nilai SAKIP nasional yang berada pada kriteria B.

Secara sistematis, nilai SAKIP Kecamatan Moyo Hilir meningkat tahun 2023 dengan nilai 61,77 (kriteria B) dan tahun 2024 meningkat dengan nilai 62,23 (kriteria B), sehingga terdapat gambaran bahwa OPD/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4.

2.1.3.2 Indikator Kinerja Kunci

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan pemerintahan yang secara langsung dilaksanakan Kecamatan Moyo Hilir Tahun 2021-2024, disajikan pada Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Moyo Hilir Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
A.	Kategori Predikat hasil Penilaian AKIP Kecamatan Moyo Hilir		-	-	C	B	B
1.	Nilai AKIP Kecamatan Moyo Hilir	Poin			44,84	68,35	51,93
B.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat		-	-	-	78,07	79,88
1.	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100	100	100	100	100
2.	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan	%	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
	Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan						
3.	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	100	100	100
4.	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	100	100	100	100	100
5.	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	100	100	100	100

Sumber : LKjIP Kecamatan Moyo Hilir Tahun 2021-2024

Dari Tabel 3.2 diketahui bahwa capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Moyo Hilir di Kabupaten Sumbawa tahun 2020-2024 secara agregat menunjukkan trend yang terus meningkat, namun capaiannya masih kecil.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa meliputi:

- 1. Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
- 2. Instansi Vertikal di Kabupaten Sumbawa.
- 3. Pemerintahan Desa Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Mitra Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa dalam pemberian pelayanan sebagai berikut :

- 1. Perangkat Desa.
- 2. Lembaga Desa.
- 3. Organisasi Masyarakat.

2.1.6 Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa, saat ini tidak ada dan masih dalam identifikasi.

2.1.7 Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Kerjasama Daerah yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa, saat ini tidak ada dan masih dalam identifikasi.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dapat disebutkan bahwa permasalahan perangkat daerah adalah kesenjangan antara kinerja perangkat daerah yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Berbagai permasalahan perangkat daerah tersebut menjadi hal penting yang akan menjadi dasar penentuan isu strategis bagi perangkat daerah. Isu strategis itu sendiri merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah karena akan memiliki dampak yang cukup signifikan bagi perangkat Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di masa yang akan datang.

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Memperhatikan isu – isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kecamatan Moyo Hilir yang terkait dengan Pelayanan atau penyelenggaraan tugas dan fungsi telah disinkronisasikan dengan hasil identifikasi permasalahan daerah pada sub urusan penunjang dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Sumbawa. Maka berbagai permasalahan pelayanan dan penyelenggaan tugas Kecamatan Moyo Hilir serta faktor-faktor yang mempengaruhinya disajikan dengan memperhatikan hasil isian seperti dibawah ini:

Tabel 3.3 Pemetaan Permasalahan Kecamatan Moyo Hilir

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Belum Optimal	Kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan masih belum efektif dan efisien.	➤ Belum optimalnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) dalam layanan. ➤ Terbatasnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan administrasi. ➤ Keterbatasan kapasitas dan kompetensi SDM kecamatan.
2	Koordinasi Pemerintahan Antar Lini Belum Maksimal	Sinergi antara kecamatan, desa, dan lintas sektor belum berjalan optimal.	➤ Belum adanya forum koordinasi lintas sektor yang terstruktur. ➤ Minimnya data dan informasi yang mendukung proses

3	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Belum Terstandar	Masih adanya desa yang belum tertib administrasi pemerintahan.	koordinasi lintas wilayah. ➤ Lemahnya mekanisme pelaporan dan evaluasi dari desa ke kecamatan. ➤ Keterbatasan jumlah dan kompetensi tenaga teknis pembina di kecamatan. ➤ Minimnya pelatihan berkelanjutan bagi aparatur desa. ➤ Belum terbangunnya sistem pembinaan dan pengawasan berbasis data.
4	Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Belum Didukung Sistem Informasi dan Kelembagaan yang Kuat	Penanganan gangguan ketertiban dan konflik sosial masih bersifat reaktif.	➤ Belum tersedia sistem pelaporan dan pemetaan konflik berbasis data. ➤ Forum-forum kemasyarakatan belum diberdayakan secara maksimal. ➤ Keterbatasan kapasitas Linmas dan relawan keamanan desa.
5	Kualitas Pelayanan Umum Masih Belum Merata di Wilayah Kecamatan	Masih ada wilayah yang sulit dijangkau layanan dasar dan administratif.	➤ Aksesibilitas infrastruktur jalan dan jaringan komunikasi masih terbatas. ➤ Belum adanya pendekatan pelayanan publik berbasis wilayah terpencil atau dusun. ➤ Keterbatasan anggaran operasional untuk menjangkau wilayah-wilayah remote.
6	Inovasi dan Budaya Kerja Aparatur Masih Belum Mapan	Kinerja dan kreativitas aparatur dalam pelayanan dan pembinaan belum optimal.	➤ Budaya kerja belum sepenuhnya berorientasi hasil dan pelayanan prima. ➤ Minimnya pelatihan inovasi dan transformasi digital bagi aparatur kecamatan. ➤ Sistem penghargaan dan insentif berbasis kinerja belum berjalan.
7.	Kualitas Layanan Administrasi Secara Digital Masih Perlu Ditingkatkan	Layanan administrasi kanal digital belum efektif.	➤ Sistem belum terintegrasi dengan baik antara desa-kecamatan-PD terkait. ➤ Belum ada evaluasi menyeluruh terhadap pemanfaatan layanan digital. ➤ Keterbatasan SDM pengelola layanan di desa dan kecamatan.

2.2.1 Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan Kecamatan untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggung jawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Kecamatan senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu strategis Kecamatan Moyo Hilir diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi kekuatan dan kelemahan dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan tantangan bagi Kecamatan Moyo Hilir di masa lima tahun mendatang. Dipersingkat sesuai dengan permasalahan yang ada.

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pemerintahan dan Birokrasi (Power, P2)	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan dalam menerapkan prinsip bersih dan melayani	Lemahnya Penegakan Hukum, Birokrasi, dan Pelayanan Publik → Sistem birokrasi yang kurang efektif, lemahnya penegakan hukum, dan rendahnya kualitas pelayanan publik menghambat tata kelola pemerintahan yang baik.	Ketegangan Geopolitik dan Ancaman terhadap Keamanan Global; Ketegangan antara negara-negara besar, seperti konflik di Ukraina, telah meningkatkan kekhawatiran tentang stabilitas dan keamanan global. Situasi ini mempengaruhi hubungan diplomatik, perdagangan internasional, dan kerjasama multilateral, yang semuanya berdampak pada stabilitas politik dan ekonomi global.	1. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan: Transformasi digital layanan publik, peningkatan indeks reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. 2. Pemberantasan korupsi dan supremasi hukum: Pencegahan tindak pidana korupsi, peningkatan indeks persepsi korupsi, serta penguatan sistem pengawasan hukum. 3. Peningkatan kapasitas fiskal dan efisiensi	1. Peningkatan stabilitas keamanan wilayah. 2. Tata Kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi. 3. Peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas.	1. Meningkatkan prasarana penunjang pelaksanaan tugas yang berbasis IT; 2. Mengembangkan kemampuan aparatur kecamatan Moyo Hilir melalui bintek dan pelatihan; 3. Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi; 4. Ketersediaan aparatur yang memiliki kompetensi dalam hal pembinaan dan pengawasan penyelenggara

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
			mengubah lanskap pekerjaan dan produksi, menuntut adaptasi cepat dari bisnis dan tenaga kerja untuk tetap kompetitif dalam ekonomi global yang berubah.	anggaran: Mendorong intensifikasi pajak dan pendapatan negara bukan pajak untuk meningkatkan ruang fiskal. 4. Penguatan tata kelola politik dan demokrasi: Peningkatan indeks demokrasi dan hak asasi manusia, serta optimalisasi peran partai politik dalam sistem pemerintahan.		an tugas tugas umum pemerintahan desa; 5. Membangun sistem pelayanan prima yang cepat, efisien, aman dan transparan; 6. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa untuk mewujudkan birokrasi yang bersih (bebas korupsi) dan akuntabel; 7. Mengembangkan sistem pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa secara terintegrasi dan berkelanjutan; 8. Meningkatkan koordinasi antara instansi pemerintahan dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas sarana prasarana yang berkaitan wajib pelayanan dasar maupun yang menyangkut urusan pilihan

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
						sehingga nampak sinergitas dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan sosial ekonomi masyarakat.

Berdasarkan permasalahan dan isu lingkungan dinamis, isu strategis Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa sebagai berikut:

1. Meningkatkan prasarana penunjang pelaksanaan tugas yang berbasis IT;
2. Mengembangkan kemampuan aparatur kecamatan Moyo Hilir melalui bintek dan pelatihan;
3. Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi;
4. Ketersediaan aparatur yang memiliki kompetensi dalam hal pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas tugas umum pemerintahan desa;
5. Membangun sistem pelayanan prima yang cepat, efisien, aman dan transparan;
6. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa untuk mewujudkan birokrasi yang bersih (bebas korupsi) dan akuntabel;
7. Mengembangkan sistem pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa secara terintegrasi dan berkelanjutan;
8. Meningkatkan koordinasi antara instansi pemerintahan dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas sarana prasarana yang berkaitan wajib pelayanan dasar maupun yang menyangkut urusan pilihan sehingga nampak sinergitas dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan sosial ekonomi masyarakat.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa, Kecamatan Moyo Hilir berperan sebagai penggerak utama pembangunan wilayah dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta fasilitasi pembangunan di tingkat desa. Kecamatan memiliki posisi strategis dalam menjembatani aspirasi dan kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pemerintah daerah, serta memastikan kelancaran koordinasi lintas sektor pemerintahan.

Kecamatan Moyo Hilir mengambil motto **MOYO HILIR BAREMA** (Berintegritas, Akuntabel, Responsif, Efektif, Melayani dan Amanah) merupakan landasan nilai yang fundamental bagi sebuah organisasi, khususnya yang bergerak dibidang pelayanan publik. Motto ini bukan sekedar slogan, melainkan panduan yang konkret untuk membentuk budaya kerja dan memberikan pelayanan prima. Berikut adalah penjabaran setiap nilai dalam motto BAREMA, dikaitkan dengan konsep pelayanan dan contoh program kegiatannya :

➤ Berintegritas

Integritas adalah pilar utama kepercayaan publik. Ini berarti adanya kesesuaian antara perkataan dan perbuatan, memegang teguh prinsip moral, etika dan peraturan yang berlaku serta menolak segala bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Kaitan dengan konsep pelayanan : Kepercayaan (Trust) : Pelayanan yang berintegritas membangun kepercayaan masyarakat bahwa setiap proses berjalan adil, transparan dan tidak ada “biaya siluman” atau perlakuan istimewa. Kepastian Hukum (Legal Certainty) : Masyarakat mendapatkan jaminan bahwa pelayanan diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku, tanpa penyimpangan. Profesionalisme : Petugas pelayanan bertindak secara professional, jujur dan tidak memihak. Contoh program kegiatannya adalah Pakta Integritas : mewajibkan seluruh pegawai menandatangani fakta integritas sebagai komitmen untuk tidak melakukan praktik KKN.

➤ Akuntabel

Akuntabilitas berarti setiap kegiatan dan hasil akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Stakeholders), terutama masyarakat. Semua pelayanan harus terukur, jelas dan laporannya dapat diakses. Kaitan dengan konsep pelayanan : Transparansi kinerja : Masyarakat berhak mengetahui bagaimana kinerja sebuah unit pelayanan, apa saja targetnya dan sejauh mana target tersebut tercapai. Pertanggungjawaban : jika terjadi kegagalan atau ketidaksesuaian dalam pelayanan, organisasi siap memberikan penjelasan dan melakukan perbaikan. Pengukuran kualitas : Pelayanan yang diberikan memiliki standar yang jelas (Standar Pelayanan Minimal) dan kinerjanya diukur secara rutin. Contoh Program kegiatannya Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) : Melakukan Survei secara berkala dan mempublikasikan hasilnya sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. Dashboard kinerja public : membuat dashboard online yang menampilkan data kinerja pelayanan secara real-time (misalnya jumlah permohonan masuk, waktu rata-rata penyelesaiannya,dll). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

: Menyusun dan mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang mudah diakses oleh publik.

➤ Responsif

Responsif adalah kemampuan untuk memahami, menanggapi dan menyelesaikan kebutuhan, keluhan serta aspirasi masyarakat dengan cepat, tepat dan tanggap. Ini bukan hanya tentang kecepatan, tetapi juga tentang empati dan kepedulian. Kaitan dengan konsep pelayanan Aksesibilitas pelayanan mudah dijangkau melalui berbagai kanal (online, telepon, tatap muka). Kecepatan dan Ketepatan : keluhan dan permintaan ditangani sesuai dengan jangka waktu yang dijanjikan (Service Level Agreement). Empati : Petugas pelayanan mampu mendengarkan dan memahami posisi masyarakat, serta memberikan solusi yang solutif. Contoh program kegiatan : Unit Layanan pengaduan terpadu : Membangun system pengelolaan pengaduan satu pintu yang terintegrasi diberbagai platform (WhatsApp, Media social, email, loket). Program “Jemput Bola” : Tim pelayanan secara proaktif mendatangi komunitas atau wilayah tertentu untuk membrikan layanan langsung. Pelatihan Keterampilan komunikasi dan Empati : Memberikan Pelatihan rutin kepada staf frontliner agar mampu berinteraksi dengan masyarakat secara lebih baik.

➤ Efektif

Efektif berarti pelayanan yang diberikan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pelayanan tidak hanya cepat (efisien), tetapi juga benar-benar menyelesaikan masalah atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Kaitan dengan konsep pelayanan : Berorientasi pada hasil (Outcome-Oriented) : Fokus utama adalah dampak positif dari pelayanan, bukan hanya sekedar selesainya proses administrasi. Tepat sasaran : Program dan layanan dirancang untuk menjawab akar permasalahan yang dihadapi oleh target audiens yang tepat. Inovasi : Terus mencari cara-cara baru yang lebih baik untuk mencapai tujuan pelayanan. Contoh program kegiatan Digitalisasi Layanan : Mengembangkan aplikasi atau portal layanan online untuk mempermudah proses dan mengurangi birokrasi. Penyederhanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) : Secara berkala meninjau dan memangkas alur layanan yang berbeli-belit.

➤ Melayani

Nilai “Melayani” Menempatkan Masyarakat sebagai fokus utama. Ini adalah tentang menanamkan pola pikir bahwa keberadaan organisasi adalah untuk memenuhi kebutuhan public dengan sikap yang ramah, tulus dan penuh dedikasi. Kaitan dengan konsep pelayanan : Keramahan (Hospitality) : menciptakan suasana yang nyaman dan ramah di setiap titik layanan. Sikap proaktif : tidak menunggu diminta, tetapi aktif menawarkan bantuan. Pelayanan Prima (Service Excellence) : Berusaha memberikan pelayanan yang melebihi ekspektasi standar. Contoh Program kegiatan : Budaya 5S (Senyum, Sapa,Salam,Sopan,Santun) Menjadikan 5S sebagai standar wajib dalam interaksi dengan masyarakat.

➤ Amanah

Amanah adalah kemampuan untuk dapat dipercaya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Ini dalah gabungan dari Integritas dan Akuntabilitas, dengan penekanan pada pelaksanaan mandate atau kepercayaan yang diemban dengan sebaik-

baiknya. Kaitan dengan konsep pelayanan : Keandalan (Reliability) : Masyarakat bisa mengandalkan bahwa layanan yang dijanjikan akan selalu diberikan secara konsisten dan berkualitas. Contoh Program kegiatan : Sertifikasi Sistem manajemen Keamanan Informasi (ISO 27001) : Mengimplementasikan standar internasional untuk melindungi data masyarakat.

3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Moyo Hilir Tahun 2025-2029

Merujuk pada petunjuk penyusunan Renstra Perangkat Daerah, bahwa sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD secara *inline* (terkait langsung) menjadi tujuan dari Perangkat Daerah. Berdasarkan sasaran RPJMD Kabupaten Sumbawa 2025-2029 dan NSPK Kecamatan Moyo Hilir, tujuan Renstra Kecamatan Moyo Hilir tahun 2025-2029 adalah “*Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pemerintah Kecamatan Moyo Hilir*”. Tujuan tersebut merupakan rumusan kondisi yang ingin dicapai hingga tahun 2029, dengan fokus utama optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta fasilitasi pembangunan di tingkat desa dan kelurahan. Tujuan Renstra Kecamatan Moyo Hilir tahun 2025-2029, indikator dan formulasi, disajikan pada Tabel 3.4 berikut.

Tabel 3.4 Tujuan Renstra Kecamatan Moyo Hilir
Tahun 2025-2029

No	Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Indikator
1	Meningkatnya kualitas dan profesionalitas ASN dalam bertugas	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pemerintah Kecamatan Moyo Hilir	Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat		Indeks Pelayanan Publik
3	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Skor Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Moyo Hilir Tahun 2025-2029

Sasaran Renstra Kecamatan Moyo Hilir tahun 2025-2029 adalah:

1. Meningkatkan Profesionalitas ASN Kecamatan Moyo Hilir.
2. Terlaksananya Pelayanan Publik Kecamatan Moyo Hilir yang baik, Efektif dan Efisien.
3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Moyo Hilir.

Secara rinci target kinerja Kecamatan Moyo Hilir tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung sasaran pembangunan daerah, serta tujuan

dan sasaran strategis Kecamatan Moyo Hilir disajikan pada Tabel 3.5 sebagai berikut.

Tabel 3.5 Sasaran Renstra Kecamatan Moyo Hilir Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pemerintah Kecamatan Moyo Hilir		Indikator Tujuan: Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN, Indeks Pelayanan Publik dan Skor Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Poin dan Nilai
	Sasaran 1: Meningkatnya Profesionalitas ASN Kecamatan Moyo Hilir	Indikator Sasaran 1.1: Kategori Indeks Profesionalitas ASN Kecamatan Moyo Hilir	Kategori
	Sasaran 2: Terlaksananya Pelayanan Publik Kecamatan Moyo Hilir yang baik, Efektif dan Efisien	Indikator Sasaran 2.1: Kategori Kepuasan Masyarakat Kecamatan Moyo Hilir	Kategori
	Sasaran 3: Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Moyo Hilir Efisien	Indikator Sasaran 3.1: Kategori AKIP Kecamatan Moyo Hilir	Kategori

Tabel 3.6 Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Renstra Kecamatan Moyo Hilir Tahun 2025-2029

SASARAN DAERAH DALAM RPJMD		TUJUAN PD		SASARAN PD		INDIKATOR		SATUAN	BASELINE KINERJA 2024	TARGET KINERJA TAHUNAN						KE T
										2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Meningkatnya kualitas dan profesionalitas ASN dalam bertugas	1		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pemerintah Kecamatan Moyo Hilir	1	Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN		Poin	76,54	79,61	82,81	86,13	89,58	93,18	96,92	
			1	Meningkatnya Profesionalitas ASN Kecamatan Moyo Hilir		Kategori Tingkat Indeks Profesionalitas ASN Kecamatan Moyo Hilir		Kategori	Sedang (71-80)	Sedang (71-80)	Sedang (71-80)	Sedang (71-80)	Tinggi (81-90)	Tinggi (81-90)		
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat				2	Indeks Pelayanan Publik		Poin	3,12	3,19	3,25	3,32	3,38	3,45	3,51	
			2	Terlaksananya Pelayanan Publik yang baik, Efektif dan Efisien		Kategori Tingkat Kepuasan Masyarakat Kecamatan Moyo Hilir		Kategori	Baik (B: 76,61-88,30)	Sangat Baik (A: 88,31-100)	Sangat Baik (A: 88,31-100)	Sangat Baik (A: 88,31-100)	Sangat Baik (A: 88,31-100)	Sangat Baik (A: 88,31-100)	Sangat Baik (A: 88,31-100)	
3	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah				3	Skor Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Nilai	62.23	63.03	63.83	64.63	65.43	66.23	67.03	

	3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Moyo Hilir		Kategori AKIP Kecamatan Moyo Hilir	Kategori	B (60-70)	B (60-70)	B (60-70)	B (60-70)	B (60-70)	BB (80-100)	BB (80-100)	
--	---	---	--	------------------------------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------------	-------------	--

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Kecamatan Moyo Hilir mengoptimalkan fungsi-fungsi perangkat daerah yang dapat digambarkan dalam kerangka renstra sebagai berikut.



Gambar 3.7 Kerangka Renstra Kecamatan Moyo Hilir Tahun 2025-2029

Dari Gambar 3.7 diketahui bahwa kerangka fungsi Kecamatan Moyo Hilir dalam pencapaian tujuan dan sasaran Renstra, serta sekaligus mendukung terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah, dirancang dengan filosofi satu kesatuan bangunan yang terdiri dari tiga bagian utama, yaitu: bagian pertama adalah atap sebagai tujuan dan sasaran, bagian kedua adalah pilar-pilar utama yang menjadi fokus utama dari tugas dan fungsi, serta bagian ketiga yaitu fondasi di lingkungan internal Kecamatan Moyo Hilir yang mendukung pencapaian dari tujuan dan sasaran. Ketiga bagian ini saling menyokong dan berkaitan satu dengan yang lainnya dan berjalan secara beriringan pada periode 2025 - 2029.

3.3 Strategi dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Moyo Hilir Tahun 2025-2029

Strategi yang ditempuh untuk setiap sasaran Renstra Kecamatan Moyo Hilir tahun 2025-2029 disajikan pada Tabel 3.8 berikut.

Tabel 3.8 Strategi pada Setiap Sasaran Renstra Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029

Operasionalisasi NSPK	Sasaran	Strategi
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Terlaksananya Pelayanan Publik Kecamatan Moyo Hilir yang baik, Efektif dan Efisien	Peningkatan Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan secara optimal
		Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat/ Desa secara optimal
		Peningkatan Kualitas Koordinasi Trantibum di

Operasionalisasi NSPK	Sasaran	Strategi
		Tingkat Kecamatan secara optimal.
		Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kecamatan secara optimal
		Peningkatan Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan secara optimal
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Moyo Hilir	peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja serta evaluasi kinerja PD

3.4 Arah Kebijakan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan adalah tindakan operasional yang lebih terperinci, menuntun Perangkat Daerah dalam merancang program/kegiatan/subkegiatan pembangunan. Arah kebijakan dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan daerah serta seiring dengan strategi untuk setiap sasaran Renstra Kecamatan Moyo Hilir tahun 2025-2029 disajikan pada Tabel 3.9 berikut.

Tabel 3.9 Arah Kebijakan Seiring Strategi untuk Setiap Sasaran Renstra Kecamatan Moyo Hilir Tahun 2025-2029

Operasionalisasi NSPK	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Renstra	Arah Kebijakan RPJMD
Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Terlaksananya Pelayanan Publik Kecamatan Moyo Hilir yang baik, Efektif dan Efisien	Peningkatan Kualitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan secara optimal	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Memperkuat kualitas Aparatur Sipil Negara, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik dan pemberdayaan masyarakat sipil
		Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat/ Desa secara optimal	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
		Peningkatan Kualitas Koordinasi Trantibum di Tingkat Kecamatan secara optimal.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Trantibum	
		Peningkatan Kualitas	Penyelenggaraan Urusan	

Operasionalisasi NSPK	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Renstra	Arah Kebijakan RPJMD
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kecamatan secara optimal	Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
		Peningkatan Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan secara optimal	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Binwas Pmdes	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Moyo Hilir	peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja serta evaluasi kinerja PD	Tersusunnya dokumen Perencanaan dan Penganggaran dan Evaluasi PD	

3.1 Pentahapan

Pentahapan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Moyo Hilir disajikan untuk keseluruhan periode Renstra (tahun 2025-2029) dan satu tahun masa transisi di akhir periode. Pentahapan secara umum dan masing-masing tujuan disajikan pada Tabel 4.0 sebagai berikut :

Tabel 4.0 Pentahapan Pembangunan Renstra Kecamatan Moyo Hilir Tahun 2025-2029 dan Transisi Tahun 2030

TAHAP 1 (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Profesionalisme ASN: Diklat intensif (kepemimpinan/pelayanan), SKP terukur.	Profesionalisme ASN: Karier berbasis kompetensi, reward & punishment .	Profesionalisme ASN: 60% jabatan fungsional di kecamatan diisi ASN kompeten.	Profesionalisme ASN: Kompetensi pejabat struktural yang mumpuni dan pejabat fungsional bersertifikasi, karier minim intervensi.	Mengintegrasikan semua hasil reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, dan upaya peningkatan kapasitas fiskal yang telah dicapai.
Tata Kelola & RB: E-Gov (e-SAKIP) lebih sempurna, naikan peringkat	Tata Kelola & RB: Target “BB”/“A” SAKIP, perluasan e-Pelayanan di	Tata Kelola & RB: OPD min. “BB” (SAKIP), e-Gov terintegrasi (SPBE) di kecamatan	Tata Kelola & RB: SAKIP kecamatan “A,” akuntabilitas tinggi.	

SAKIP OPD	kecamatan			
Penerapan Standar Operasional Prosedur dan standar Pelayanan yang Optimal	Pembangunan Budaya Pelayanan dan Penanganan Pengaduan serta Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Digitalisasi dan Integrasi pelayanan publik	Peningkatan Inovasi dan Perluasan Akses Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Prima yang Berkelanjutan

BAB IV

PROGRAM KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sesuai dengan visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan serta tugas pokok dan fungsi organisasi, maka dirumuskan program kerja dan kegiatan Kantor Kecamatan Moyo Hilir untuk Tahun Lima Tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif

a. Program, Kegiatan, Subkegiatan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Sasaran program ini adalah terselenggaranya administrasi perkantoran secara optimal dalam mendukung implementasi tupoksi organisasi yang dicapai dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyediaan jasa surat menyurat;
- b. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik;
- c. Penyediaan jasa administrasi keuangan;
- d. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
- e. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
- f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
- g. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Sasaran program ini adalah dalam rangka memantapkan dukungan sarana prasarana dalam pelaksanaan tugas aparatur di lingkungan kerja Kantor Kecamatan Moyo Hilir, adalah sebagai berikut.

- a. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan / dinas ;
- b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
- c. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas;
- d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
- e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional;
- f. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor;
- g. Pembangunan Gedung Kantor.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Sasaran program ini adalah mendukung terlaksananya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Kantor Kecamatan Labangka dalam rangka mendukung transparansi organisasi dengan rencana kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Kantor Kecamatan Moyo Hilir;
 - b. Penyusunan Laporan Tahunan SKPD;
 - c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
4. Program Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Sasaran program ini adalah mendukung terlaksananya sistem penyusunan Rencana Kerja pada Kantor Kecamatan Moyo Hilir dalam rangka mendukung transparansi organisasi dengan rencana kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyusunan RKA dan DPA Kantor Kecamatan Moyo Hilir
 - b. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kantor Kecamatan Moyo Hilir.
5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial
- a. Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
6. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Sasaran dari program ini adalah terselenggaranya tugas-tugas pemerintahan umum di Kecamatan Moyo Hilir, dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Pembinaan administrasi pemerintahan desa
 - b. Pembinaan dan penyelenggaraan pelayanan PBB dan PBG
 - c. Pembinaan kegiatan keagamaan / pelaksanaan STQ/MTQ
 - d. Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
 - e. Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan Desa
 - f. Pembinaan dan Pengembangan Promosi Desa Sehat (PHBS)
 - g. Pembinaan dan Pengembangan Posyandu, PAUD dan BKB (POSPA-BKB)
 - h. Pembinaan Ketentraman dan Ketertibaban Umum
7. Program Koordinasi Pembangunan Kecamatan

Sasaran dari program ini adalah terjalannya Koordinasi pembangunan di wilayah Kecamatan dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Koordinasi Pembangunan Sosial Ekonomi
- b. Koordinasi Pembangunan Sarana Prasarana
- c. Koordinasi Pembangunan Sosial Kemasyarakatan
- d. Koordinasi Pembangunan Keamanan dan Ketertiban Umum

b. Indikator

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan

jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
 - a. Pembinaan administrasi pemerintahan desa
 - b. Pembinaan dan penyelenggaraan pelayanan PBB dan IMB
 - c. Pembinaan kegiatan keagamaan / pelaksanaan STQ/MTQ
 - d. Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
 - e. Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan Desa
 - f. Pembinaan dan Pengembangan Promosi Desa Sehat (PHBS)
 - g. Pembinaan dan Pengembangan Posyandu, PAUD dan BKB (POSPA-BKB)
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
 - a. pembinaan kelembagaan-kelembagaan yang ada di desa-desa dalam wilayah Kecamatan Moyo Hilir.
 - b. Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.
 - c. Pembinaan Kelompok petani, Peternak dan kelompok Nelayan
3. Mengkoordinasikan upaya ketentraman dan ketertiban umum
 - a. Koordinasi dengan Instansi vertikal terkait dengan pengamanan wilayah guna meminimalisir gangguan keamanan dan ketertiban dalam wilayah Kecamatan Moyo Hilir terutama gangguan Pencurian ternak, kekerasan dalam rumah tangga dan pencurian dengan kekerasan.
 - b. Koordinasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, empat pilar dan linmas desa untuk menjaga kondusifitas wilayah dalam lingkup wilayah Kecamatan Moyo Hilir.
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati/walikota.

Koordinasi berkaitan dengan hal pengamanan kebijakan Pemerintah Daerah dal hal perijinan-perijinan yang meliputi :

 - PBG
 - IPKTM
 - Ijin Usaha
 - Rekomendasi
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
 - a. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan / dinas;
 - b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
 - c. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas;
 - d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
 - e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional;
 - f. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor;
 - g. koordinasi Pemeliharaan fasilitas-fasilitas umum;
 - h. Pembangunan Gedung kantor

6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan Pemerintah Daerah ditingkat Kecamatan.
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa.
 - a. Koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pengelolaan Administrasi Desa
 - b. Koordinasi dan pengawasan pengelolaan keuangan Desa
 - c. Koordinasi dan pembinaan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
8. Melakukan urusan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan.
 - a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Kantor Kecamatan Moyo Hilir;
 - b. Penyusunan Laporan Tahunan SKPD;
 - c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Penyusunan RKA dan DPA Kantor Kecamatan Moyo Hilir
 - e. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kantor Kecamatan Moyo Hilir.
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh perundang-undangan.
 - a. Koordinasi Pembangunan Sosial Ekonomi
 - b. Koordinasi Pembangunan Sarana Prasarana
 - c. Koordinasi Pembangunan Sosial Kemasyarakatan
 - d. Koordinasi Pembangunan Keamanan dan Ketertiban Umum

Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029

No	Program	Kegiatan	Uraian Operasional Kegiatan
1	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<u>Uraian Kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan Koordinasi dan Sinergi Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait. <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan pada seluruh wilayah Kecamatan Moyo Hilir mencakup seluruh masyarakat di wilayah kecamatan Moyo Hilir. <u>Waktu Pelaksanaan Kegiatan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun. 2025-2029. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Pelaksanaan kegiatan ini berbagai pihak antara lain Perangkat Desa dan Perangkat Daerah lainnya <u>Manfaat Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan efektifitas dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u>

			Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan berkoordinasi dan bersinergi dengan instansi vertikal dan perangkat daerah lainnya terkait dalam hal pelaksanaan pemberian pelayanan pada masyarakat Moyo Hilir
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yang Ada di Kecamatan	<u>Uraian Kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan memfasilitasi setiap desa dalam memebrikan rekomendasi terkait pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan pada seluruh wilayahKecamatan Moyo Hilir mencakup seluruh masyarakat di wilayah kecamatan Moyo Hilir. <u>Waktu Pelaksanaan Kegiatan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun. 2025-2029. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Pelaksanaan kegiatan ini berbagai pihak antara lain Perangkat Desa dan Perangkat Daerah lainnya <u>Manfaat Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan untuk kepastian pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan Moyo Hilir. <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan berkoordinasi dan bersinergi dengan instansi vertikal dan perangkat daerah lainnya terkait dalam hal pelaksanaan pelayanan pada masyarakat Moyo Hilir
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	<u>Uraian Kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan Koordinasi dalam hal pemeliharaan prasarana dan sarana untuk menunjang Pelayanan kepada masyarakat. <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan pada seluruh wilayah Kecamatan Moyo Hilir mencakup seluruh masyarakat di wilayah kecamatan Moyo Hilir. <u>Waktu Pelaksanaan Kegiatan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun. 2025-2029.
			<u>Pihak yang Terlibat:</u> Pelaksanaan kegiatan ini berbagai pihak antara lain Rekanan dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah <u>Manfaat Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u>

			Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan berkoordinasi dan bersinergi dengan instansi vertikal dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah terkait dalam hal peningkatan pemberian pelayanan pada masyarakat Moyo Hilir
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	<u>Uraian Kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan Koordinasi dalam hal pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan untuk menunjang Pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan urusan pemerintahan yang dilimpahkan. <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan pada seluruh wilayah Kecamatan Moyo Hilir mencakup seluruh masyarakat di wilayah kecamatan Moyo Hilir. <u>Waktu Pelaksanaan Kegiatan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun. 2025-2029. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Pelaksanaan kegiatan ini berbagai pihak antara lain Perangkat Desa dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa. <u>Manfaat Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam bidang pajak daerah. <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan berkoordinasi dan bersinergi dengan Perangkat Desa dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa terkait dalam hal peningkatan layanan terkait pajak asli daerah yakni Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan.
2	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.	<u>Uraian Kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan Koordinasi dan Sinergi Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan Perangkat Daerah. <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan pada seluruh wilayah Kecamatan Moyo Hilir mencakup seluruh masyarakat di wilayah kecamatan Moyo Hilir. <u>Waktu Pelaksanaan Kegiatan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun. 2025-2029. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Pelaksanaan kegiatan ini berbagai pihak antara lain Perangkat Desa dan Perangkat Daerah lainnya <u>Manfaat Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Moyo Hilir.

			<u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan berkoordinasi dan bersinergi dengan instansi perangkat daerah lainnya terkait dalam hal Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Moyo Hilir
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		<u>Uraian Kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan Koordinasi dan Sinergi Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan. <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan pada seluruh wilayah Kecamatan Moyo Hilir mencakup seluruh masyarakat di wilayah kecamatan Moyo Hilir. <u>Waktu Pelaksanaan Kegiatan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun. 2025-2029. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Pelaksanaan kegiatan ini berbagai pihak antara lain Ormas, Karang Taruna dan Perangkat Daerah lainnya <u>Manfaat Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan Moyo Hilir. <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan berkoordinasi dan bersinergi dengan instansi terkait seperti Sosialisasi dan peningkatan kapasitas terhadap anggota Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan Moyo Hilir .
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		<u>Uraian Kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan Koordinasi dan Sinergi Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan . <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan pada seluruh wilayah Kecamatan Moyo Hilir mencakup seluruh masyarakat di wilayah kecamatan Moyo Hilir. <u>Waktu Pelaksanaan Kegiatan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun. 2025-2029.
			<u>Pihak yang Terlibat:</u> Pelaksanaan kegiatan ini berbagai pihak antara lain UPT Puskesmas, TP PKK setiap Desa dan Perangkat Daerah lainnya <u>Manfaat Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas keluarga, penurunan stunting dan ketahanan pangan. <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u>

			Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan berkoordinasi dan bersinergi dengan instansi perangkat daerah lainnya seperti Sosialisasi, penyuluhan, pelatihan, Lomba Kebun Gizi dan Pemberian Makanan Tambahan.
3	Koordinasi Trantibum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<u>Uraian Kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum . <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan pada seluruh wilayah Kecamatan Moyo Hilir mencakup seluruh masyarakat di wilayah kecamatan Moyo Hilir. <u>Waktu Pelaksanaan Kegiatan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun. 2025-2029. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Pelaksanaan kegiatan ini berbagai pihak antara lain Forkopimca, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Perangkat Daerah lainnya <u>Manfaat Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan untuk menjaga stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan Moyo Hilir <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan berkoordinasi dan bersinergi dengan semua pihak yang berperan dalam menjaga stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan Moyo Hilir.
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	<u>Uraian Kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada. <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan pada seluruh wilayah Kecamatan Moyo Hilir mencakup seluruh masyarakat di wilayah kecamatan Moyo Hilir. <u>Waktu Pelaksanaan Kegiatan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun. 2025-2029. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Pelaksanaan kegiatan ini berbagai pihak antara lain Forkopimca, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Perangkat Daerah lainnya <u>Manfaat Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan untuk menjaga stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan Moyo Hilir <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u>

			Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan berkoordinasi dan bersinergi dengan semua pihak yang berperan dalam menerapkan dan penegakan Perda dan Perkada di wilayah kecamatan Moyo Hilir.
4	Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umuml	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	<u>Uraian Kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah. <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan pada seluruh wilayah Kecamatan Moyo Hilir mencakup seluruh masyarakat di wilayah kecamatan Moyo Hilir. <u>Waktu Pelaksanaan Kegiatan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun. 2025-2029. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Pelaksanaan kegiatan ini berbagai pihak antara lain Forkopimca, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Perangkat Daerah lainnya <u>Manfaat Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan untuk menjaga stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan Moyo Hilir <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan berkoordinasi dan bersinergi dengan semua pihak yang berperan dalam menerapkan dan penegakan Perda dan Perkada di wilayah kecamatan Moyo Hilir.
5	Binwas Pemdes	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Binwas Pemdes	<u>Uraian Kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Binwas Pemdes. <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan pada seluruh wilayah Kecamatan Moyo Hilir mencakup seluruh masyarakat di wilayah kecamatan Moyo Hilir. <u>Waktu Pelaksanaan Kegiatan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun. 2025-2029. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Pelaksanaan kegiatan ini berbagai pihak antara lain Perangkat Desa dan Perangkat Daerah lainnya <u>Manfaat Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan rekomendasi APBdes di wilayah Kecamatan <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u>

			Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan memfasilitasi setiap desa dalam memberikan rekomendasi terkait pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa di wilayah kecamatan Moyo Hilir.
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<u>Nama Kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah (jangka menengah, tahunan, semesteran maupun bulanan) dan evaluasi kinerja perangkat daerah meliputi : Renstra, Renja perangkat daerah, RKA/perubahan RKA, DPA/perubahan DPA, Pelaporan (LkjIP, laporan monev, laporan urusan pemerintahan, laporan lainnya) <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan pada seluruh wilayahKecamatan Moyo Hilir mencakup seluruh masyarakat di wilayah kecamatan Moyo Hilir. <u>Waktu Pelaksanaan Kegiatan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun 2025-2029. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Dalam pelaksanaan kegiatan ini melibatkan beberapa pihak yaitu unit kerja bidang pada Kantor Camat Moyo Hilir. <u>Manfaat Kegiatan:</u> Kegiatan ini bermanfaat dalam menyusun perencanaan dan penganggaran DiskominfoTiksiandi setiap tahun. <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri di internal Kantor Camat Moyo Hilir
		Administrasi Keuangan PD	<u>Nama Kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan rangkaian proses administrasi keuangan perangkat daerah meliputi : menyediakan gaji dan tunjangan ASN, penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN, penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD, dan penyusunan laporan keuangan SKPD (bulanan/ triwulanan/ semesteran) <u>Lokasi Kegiatan :</u> Kegiatan ini dilaksanakan pada seluruh wilayahKecamatan Moyo Hilir mencakup seluruh masyarakat di wilayah kecamatan Moyo Hilir. <u>Waktu Pelaksanaan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun 2025-2029. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Dalam pelaksanaan kegiatan ini melibatkan beberapa pihak yaitu unit

		kerja bidang pada Kantor Camat Moyo Hilir. <u>Manfaat Kegiatan:</u> Kegiatan ini bermanfaat dalam memastikan berjalannya seluruh administrasi keuangan secara lancar dan akuntabel untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN, administrasi pelaksanaan tugas ASN serta pelaporan keuangan SKPD (bulanan/ triwulanan/ semesteran/ tahunan). <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri di internal Kantor Camat Moyo Hilir.
	Administrasi BMD pada PD	<u>Nama Kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan administrasi BMD perangkat daerah meliputi perencanaan kebutuhan BMD SKPD <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan pada seluruh wilayahKecamatan Moyo Hilir mencakup seluruh masyarakat di wilayah kecamatan Moyo Hilir. <u>Waktu Pelaksanaan Kegiatan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun 2025-2029. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Dalam pelaksanaan kegiatan ini melibatkan beberapa pihak yaitu unit kerja bidang pada Kantor Camat Moyo Hilir. <u>Manfaat Kegiatan:</u> Kegiatan ini bermanfaat dalam memastikan berjalannya seluruh administrasi BMD DiskominfoTiksiandi. <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri di internal Kantor Camat Moyo Hilir.
	Administrasi Kepegawaian PD	<u>Nama Kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan administrasi kepegawaian daerah meliputi monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai, serta pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi. <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan pada seluruh wilayahKecamatan Moyo Hilir mencakup seluruh masyarakat di wilayah kecamatan Moyo Hilir. <u>Waktu Pelaksanaan Kegiatan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun 2025-2029. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Dalam pelaksanaan kegiatan ini melibatkan beberapa pihak yaitu unit

		kerja bidang pada Kantor Camat Moyo Hilir. <u>Manfaat Kegiatan:</u> Kegiatan ini bermanfaat dalam memastikan para pegawai agar dapat bekerja optimal sesuai dengan tugas, fungsi, dan kompetensi teknis masing-masing. <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri di internal Kantor Camat Moyo Hilir dan eksternal, yaitu instansi pembina penyelenggara pendidikan dan pelatihan sesuai tusi pegawai yang akan mengikuti diklat.
	Administrasi Umum PD	<u>Nama Kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan administrasi umum perangkat daerah meliputi menyediakan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai kebutuhan, fasilitasi kebutuhan pelayanan Kunjungan Tamu kedinasan, fasilitasi pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD baik dalam daerah maupun luar daerah oleh pimpinan dan aparatur lainnya. <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan pada seluruh wilayahKecamatan Moyo Hilir mencakup seluruh masyarakat di wilayah kecamatan Moyo Hilir. <u>Waktu Pelaksanaan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Dalam pelaksanaan kegiatan ini melibatkan beberapa pihak yaitu unit kerja bidang pada Kantor Camat Moyo Hilir. <u>Manfaat Kegiatan:</u> Kegiatan ini bermanfaat dalam memastikan berjalannya seluruh administrasi umum Kantor Camat Moyo Hilir dalam pelaksanaan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan, fasilitasi kebutuhan pelayanan kunjungan tamu kedinasan, fasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi/konsultasi SKPD baik dalam daerah maupun luar daerah oleh pimpinan dan aparatur lainnya. <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri di internal Kantor Camat Moyo Hilir.
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<u>Nama Kegiatan:</u>

		Kegiatan ini merupakan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah meliputi: pelaksanaan penyediaan kebutuhan jasa surat menyurat, penyediaan kebutuhan jasa komunikasi/Sumber Daya Air/Listrik kantor, penyediaan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan kebutuhan jasa pelayanan umum kantor. <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan pada seluruh wilayahKecamatan Moyo Hilir mencakup seluruh masyarakat di wilayah kecamatan Moyo Hilir. <u>Waktu Pelaksanaan Kegiatan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun 2025-2029. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Dalam pelaksanaan kegiatan ini melibatkan beberapa pihak yaitu unit kerja bidang pada Kantor Camat Moyo Hilir. <u>Manfaat Kegiatan:</u> Kegiatan ini bermanfaat dalam memastikan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Kantor Camat Moyo Hilir berjalan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri di internal Kantor Camat Moyo Hilir.
	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<u>Nama Kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan meliputi: penyediaan kebutuhan jasa/biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas. Tujuannya menyediakan kebutuhan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan pada seluruh wilayahKecamatan Moyo Hilir mencakup seluruh masyarakat di wilayah kecamatan Moyo Hilir. <u>Waktu Pelaksanaan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun 2025-2029. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Dalam pelaksanaan kegiatan ini melibatkan beberapa pihak yaitu unit kerja bidang pada Kantor Camat Moyo Hilir. <u>Manfaat Kegiatan:</u> Kegiatan ini bermanfaat dalam menunjang pelaksanaan tugas dan

			fungsi perangkat daerah dalam hal kebutuhan jasa/biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan jabatan <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri di internal Kantor Camat Moyo Hilir.
--	--	--	--

Tabel 4.2 Program/Kegiatan/Subkegiatan Beserta Indikator Kinerja, Target dan Pagu Indikatif Kecamatan Moyo Hilir
Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGA N
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGE T	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.01- KECAMATAN					2.561.311.989,00		2.940.373.325,00		3.458.874.701,00		4.149.539.753,00		5.021.975.677,00			
7.0101- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA					1.963.041.334,00		2.092.847.339,00		2.233.905.119,00		2.387.850.100,00		2.556.079.181,00			
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Moyo Hilir	Nilai AKIP Kecamatan Moyo Hilir (Poin)	68,35	70,02	73,63	1.958.988.419,00	75,42	2.088.389.155,00	77,22	2.229.001.117,00	80,01	2.382.455.697,00	82,00	2.550.145.338,00	7.010.00.0.00.14.000 0 - Kecamatan Moyo Hilir		
7.01012.01- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					32.488.500,00		35.737.350,00		39.311.085,00		43.242.191,00		43.242.591,00			
Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kinerja PD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	1	32.488.500,00	1	35.737.350,00	1	39.311.085,00	1	43.242.191,00	1	43.242.591,00			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2				
7.01012.010001- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					3.788.400,00		4.167.240,00		4.583.964,00		5.042.360,00		5.042.760,00		Moyo Hilir	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGA N
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGE T	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	2	3.788.400,00	2	4.167.240,00	2	4.583.964,00	2	5.042.360,00	2	5.042.760,00			
7.01012.010002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					4.239.400,00		4.663.340,00		5.129.674,00		5.642.641,00		5.642.641,00		Moyo Hilir	
Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1	4.239.400,00	1	4.663.340,00	1	5.129.674,00	1	5.642.641,00	1	5.642.641,00			
7.01012.010003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					4.580.400,00		5.038.440,00		5.542.284,00		6.096.512,00		6.096.512,00		Moyo Hilir	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1	4.580.400,00	1	5.038.440,00	1	5.542.284,00	1	6.096.512,00	1	6.096.512,00			
7.01012.010004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD					8.552.500,00		9.407.750,00		10.348.525,00		11.383.377,00		11.383.377,00		Moyo Hilir	
Tersedianya Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	1	8.552.500,00	1	9.407.750,00	1	10.348.525,00	1	11.383.377,00	1	11.383.377,00			
7.01012.010005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					4.279.000,00		4.706.900,00		5.177.590,00		5.695.349,00		5.695.349,00		Moyo Hilir	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	1	4.279.000,00	1	4.706.900,00	1	5.177.590,00	1	5.695.349,00	1	5.695.349,00			
7.01012.010006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					4.848.800,00		5.333.680,00		5.867.048,00		6.453.752,00		6.453.752,00		Moyo Hilir	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	1	4.848.800,00	1	5.333.680,00	1	5.867.048,00	1	6.453.752,00	1	6.453.752,00			
7.01012.010007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2.200.000,00		2.420.000,00		2.662.000,00		2.928.200,00		2.928.200,00		Moyo Hilir	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	1	2.200.000,00	1	2.420.000,00	1	2.662.000,00	1	2.928.200,00	1	2.928.200,00			
7.01012.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1.497.029.338,00		1.807.061.796,00		1.919.541.025,00		2.040.539.599,00		2.208.228.840,00			
Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan PD	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1		1	1.497.029.338,00	1	1.807.061.796,00	1	1.919.541.025,00	1	2.040.539.599,00	1	2.208.228.840,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGA N
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGE T	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1		1		1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1		1		1		1		1		1				
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		1		1		1		1		1				
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1		1		1		1		1		1				
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	12	12	12		12		12		12		12				
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1		1		1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1		1		1		1		1		1				
7.01012.02.0001- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					1424.328.842,00		1727.09125100		1831573.427,00		1943.775.24100		2.111464.482,00		Moyo Hilir	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	12	12	12	1424.328.842,00	12	1727.09125100	12	1831573.427,00	12	1943.775.24100	12	2.111464.482,00			
7.01012.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					56.611500,00		62.272.650,00		68.499.915,00		75.349.906,00		75.349.906,00		Moyo Hilir	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1		1	56.611500,00	1	62.272.650,00	1	68.499.915,00	1	75.349.906,00	1	75.349.906,00			
7.01012.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					3.625.050,00		3.987.555,00		4.386.310,00		4.824.941,00		4.824.941,00		Moyo Hilir	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1		1	3.625.050,00	1	3.987.555,00	1	4.386.310,00	1	4.824.941,00	1	4.824.941,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGA N
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGE T	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.01012.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Moyo Hilir	
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1		1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00			
7.01012.02.0005 - Koordmasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					5.215.056,00		5.736.561,00		6.310.217,00		6.941.239,00		6.941.239,00		Moyo Hilir	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		1	5.215.056,00	1	5.736.561,00	1	6.310.217,00	1	6.941.239,00	1	6.941.239,00			
7.01012.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan					3.623.950,00		3.986.345,00		4.384.979,00		4.823.477,00		4.823.477,00		Moyo Hilir	
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1		1	3.623.950,00	1	3.986.345,00	1	4.384.979,00	1	4.823.477,00	1	4.823.477,00			
7.01012.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					3.624.940,00		3.987.434,00		4.386.177,00		4.824.795,00		4.824.795,00		Moyo Hilir	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1		1	3.624.940,00	1	3.987.434,00	1	4.386.177,00	1	4.824.795,00	1	4.824.795,00			
7.01012.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Moyo Hilir	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1		1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00			
7.01012.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					8.098.970,00		8.908.867,00		9.799.753,00		10.779.728,00		10.779.728,00			
Tersusunnya Dokumen Administrasi BMD pada PD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	1	8.098.970,00	1	8.908.867,00	1	9.799.753,00	1	10.779.728,00	1	10.779.728,00			
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		1		1		1		1		1				
7.01012.03.0001- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					3.593.370,00		3.952.707,00		4.347.977,00		4.782.775,00		4.782.775,00		Moyo Hilir	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGA N
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGE T	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		1	3.593.370,00	1	3.952.707,00	1	4.347.977,00	1	4.782.775,00	1	4.782.775,00			
7.01012.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					4.505.600,00		4.956.160,00		5.451.776,00		5.996.953,00		5.996.953,00		Moyo Hilir	
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	1	4.505.600,00	1	4.956.160,00	1	5.451.776,00	1	5.996.953,00	1	5.996.953,00			
7.01012.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					74.006.680,00		81407.348,00		89.548.081,00		98.502.889,00		98.502.889,00			
Tersusunnya Dokumen Administrasi Umum PD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	12	74.006.680,00	12	81407.348,00	12	89.548.081,00	12	98.502.889,00	12	98.502.889,00			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	12		12		12		12		12				
7.01012.06.0001- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					5.480.750,00		6.028.825,00		6.631.707,00		7.294.878,00		7.294.878,00		Moyo Hilir	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1	5.480.750,00	1	6.028.825,00	1	6.631.707,00	1	7.294.878,00	1	7.294.878,00			
7.01012.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					4.129.180,00		4.542.098,00		4.996.307,00		5.495.938,00		5.495.938,00		Moyo Hilir	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1	4.129.180,00	1	4.542.098,00	1	4.996.307,00	1	5.495.938,00	1	5.495.938,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGA N
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGE T	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.01012.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					3.281850,00		3.610.035,00		3.971038,00		4.368.142,00		4.368.142,00		Moyo Hilir	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	1	3.281850,00	1	3.610.035,00	1	3.971038,00	1	4.368.142,00	1	4.368.142,00			
7.01012.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor					2.853.400,00		3.138.740,00		3.452.614,00		3.797.875,00		3.797.875,00		Moyo Hilir	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1	2.853.400,00	1	3.138.740,00	1	3.452.614,00	1	3.797.875,00	1	3.797.875,00			
7.01012.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					3.795.000,00		4.174.500,00		4.591950,00		5.051145,00		5.051145,00		Moyo Hilir	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	12	3.795.000,00	12	4.174.500,00	12	4.591950,00	12	5.051145,00	12	5.051145,00			
7.01012.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu					26.235.000,00		28.858.500,00		31744.350,00		34.918.785,00		34.918.785,00		Moyo Hilir	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	12	26.235.000,00	12	28.858.500,00	12	31744.350,00	12	34.918.785,00	12	34.918.785,00			
7.01012.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					28.231500,00		31054.650,00		34.160.115,00		37.576.126,00		37.576.126,00		Moyo Hilir	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	1	28.231500,00	1	31054.650,00	1	34.160.115,00	1	37.576.126,00	1	37.576.126,00			
7.01012.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					246.978.436,00		44.848.650,00		49.333.515,00		54.266.866,00		54.266.866,00			
Tersusunnya Dokumen Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemda	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	1	246.978.436,00	1	44.848.650,00	1	49.333.515,00	1	54.266.866,00	1	54.266.866,00			
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	1		1		1		1		1				
7.01012.07.0005 - Pengadaan Mebel					6.121500,00		6.733.650,00		7.407.015,00		8.147.716,00		8.147.716,00		Moyo Hilir	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	1	1	6.121500,00	1	6.733.650,00	1	7.407.015,00	1	8.147.716,00	1	8.147.716,00			
7.01012.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					229.856.936,00		26.015.000,00		28.616.500,00		31478.150,00		31478.150,00		Moyo Hilir	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	1	229.856.936,00	1	26.015.000,00	1	28.616.500,00	1	31.478.150,00	1	31.478.150,00			
7.01012.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					5.500.000,00		6.050.000,00		6.655.000,00		7.320.500,00		7.320.500,00		Moyo Hilir	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	1	5.500.000,00	1	6.050.000,00	1	6.655.000,00	1	7.320.500,00	1	7.320.500,00			
7.01012.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					5.500.000,00		6.050.000,00		6.655.000,00		7.320.500,00		7.320.500,00		Moyo Hilir	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	1	5.500.000,00	1	6.050.000,00	1	6.655.000,00	1	7.320.500,00	1	7.320.500,00			
7.01012.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					46.750.000,00		51.425.000,00		56.567.500,00		62.224.250,00		62.224.250,00			
Tersusunnya Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	1	46.750.000,00	1	51.425.000,00	1	56.567.500,00	1	62.224.250,00	1	62.224.250,00			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	1		1		1		1		1				
7.01012.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat					13.750.000,00		15.125.000,00		16.637.500,00		18.301.250,00		18.301.250,00		Moyo Hilir	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	1	13.750.000,00	1	15.125.000,00	1	16.637.500,00	1	18.301.250,00	1	18.301.250,00			
7.01012.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					13.200.000,00		14.520.000,00		15.972.000,00		17.569.200,00		17.569.200,00		Moyo Hilir	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	1	13.200.000,00	1	14.520.000,00	1	15.972.000,00	1	17.569.200,00	1	17.569.200,00			
7.01012.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					19.800.000,00		21.780.000,00		23.958.000,00		26.353.800,00		26.353.800,00		Moyo Hilir	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGE T	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	1	19.800.000,00	1	21780.000,00	1	23.958.000,00	1	26.353.800,00	1	26.353.800,00			
7.01012.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		Moyo Hilir	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00			
7.01012.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					53.636.495,00		59.000.144,00		64.900.158,00		72.900.174,00		72.900.174,00			
Tersusunnya Dokumen Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	1	53.636.495,00	1	59.000.144,00	1	64.900.158,00	1	72.900.174,00	1	72.900.174,00			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2	2	2		2		2		2		2				
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	2		2		2		2		2				
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	1		1		1		1		1				
7.01012.09.0001- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					33.902.495,00		37.292.744,00		41022.018,00		45.124.220,00		45.124.220,00		Moyo Hilir	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	1	33.902.495,00	1	37.292.744,00	1	41022.018,00	1	45.124.220,00	1	45.124.220,00			
7.01012.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					2.200.000,00		2.420.000,00		2.662.000,00		2.928.200,00		2.928.200,00		Moyo Hilir	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2	2	2	2.200.000,00	2	2.420.000,00	2	2.662.000,00	2	2.928.200,00	2	2.928.200,00			
7.01012.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					5.500.000,00		6.050.000,00		6.655.000,00		7.320.500,00		7.320.500,00		Moyo Hilir	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	1	5.500.000,00	1	6.050.000,00	1	6.655.000,00	1	7.320.500,00	1	7.320.500,00			
7.01012.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0,00		0,00		0,00		1.510.000,00		1.510.000,00		Moyo Hilir	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	1.510.000,00	1	1.510.000,00			
7.01012.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					12.034.000,00		13.237.400,00		14.561.140,00		16.017.254,00		16.017.254,00		Moyo Hilir	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	2	12.034.000,00	2	13.237.400,00	2	14.561.140,00	2	16.017.254,00	2	16.017.254,00			
Meningkatnya Profesional ASN Kecamatan Moyo Hilir	IP-ASN Kecamatan Moyo Hilir (Poin)	71,92	71,92	74,00	4.052.895,00	76,00	4.458.184,00	78,00	4.904.002,00	80,00	5.394.403,00	82,00	5.933.843,00			
7.01012.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					4.052.895,00		4.458.184,00		4.904.002,00		5.394.403,00		5.933.843,00			
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kapasitas ASN PD	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	1	4.052.895,00	1	4.458.184,00	1	4.904.002,00	1	5.394.403,00	1	5.933.843,00			
7.01012.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					4.052.895,00		4.458.184,00		4.904.002,00		5.394.403,00		5.933.843,00		Moyo Hilir	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	1	4.052.895,00	1	4.458.184,00	1	4.904.002,00	1	5.394.403,00	1	5.933.843,00			
7.0102 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					34.953.300,00		62.915.940,00		106.957.098,00		171.131.357,00		256.697.035,00			
Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Moyo Hilir secara optimal	Cakupan pelaksanaan pelimpahan urusan pemerintahan dan pelayanan publik Kecamatan Moyo Hilir (%)	100,00	100,00	100,00	34.953.300,00	100,00	62.915.940,00	100,00	106.957.098,00	100,00	171.131.357,00	100,00	256.697.035,00	7.010.00.0.00.14.0000 - Kecamatan Moyo Hilir		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGE T	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.0102.2.01- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					8.198.300,00		9.018.130,00		9.919.943,00		10.911.937,00		10.911.937,00			
Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	1	1	1	8.198.300,00	1	9.018.130,00	1	9.919.943,00	1	10.911.937,00	1	10.911.937,00			
7.0102.2.010002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					8.198.300,00		9.018.130,00		9.919.943,00		10.911.937,00		10.911.937,00		Moyo Hilir	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	1	1	1	8.198.300,00	1	9.018.130,00	1	9.919.943,00	1	10.911.937,00	1	10.911.937,00			
7.0102.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum					14.556.300,00		16.011.930,00		17.613.123,00		19.374.435,00		19.374.435,00			
terselenggaranya koordinasi dan pemeliharaan prasana dan sarana pelayanan umum	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta (Unit)	1	1	1	14.556.300,00	1	16.011.930,00	1	17.613.123,00	1	19.374.435,00	1	19.374.435,00			
	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1				
7.0102.2.03.0001- Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum					9.639.300,00		10.603.230,00		11.663.553,00		12.829.908,00		12.829.908,00		Moyo Hilir	
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	1	1	1	9.639.300,00	1	10.603.230,00	1	11.663.553,00	1	12.829.908,00	1	12.829.908,00			
7.0102.2.03.0002 - Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta					4.917.000,00		5.408.700,00		5.949.570,00		6.544.527,00		6.544.527,00		Moyo Hilir	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGE T	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum dengan Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta (Unit)	1	1	1	4.917.000,00	1	5.408.700,00	1	5.949.570,00	1	6.544.527,00	1	6.544.527,00			
7.0102.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					12.198.700,00		37.885.880,00		79.424.032,00		140.844.985,00		226.410.663,00			
Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	1	1	1	12.198.700,00	1	37.885.880,00	1	79.424.032,00	1	140.844.985,00	1	226.410.663,00			
	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	1	1	1		1		1		1		1				
7.0102.2.04.0001- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha					4.515.200,00		30.160.030,00		70.925.598,00		131.496.707,00		217.062.385,00		Moyo Hilir	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	1	1	1	4.515.200,00	1	30.160.030,00	1	70.925.598,00	1	131.496.707,00	1	217.062.385,00			
7.0102.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan					3.841.750,00		4.225.925,00		4.648.517,00		5.113.369,00		5.113.369,00		Moyo Hilir	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	1	1	1	3.841.750,00	1	4.225.925,00	1	4.648.517,00	1	5.113.369,00	1	5.113.369,00			
7.0102.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					3.841.750,00		3.499.925,00		3.849.917,00		4.234.909,00		4.234.909,00		Moyo Hilir	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	1	1	1	3.841.750,00	1	3.499.925,00	1	3.849.917,00	1	4.234.909,00	1	4.234.909,00			
7.0103 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					123.970.000,00		223.146.000,00		379.348.200,00		606.957.120,00		910.435.680,00			
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kecamatan Moyo Hilir	Cakupan LKDLKK yang mendapatkan pemberdayaan Kecamatan Moyo Hilir (%)	100	100	100	123.970.000,00	100	223.146.000,00	100	379.348.200,00	100	606.957.120,00	100	910.435.680,00	7.010.00.0.00.14.0000 - Kecamatan Moyo Hilir		
7.0103.2.01- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					19.504.180,00		21.674.488,00		23.841.936,00		26.226.129,00		26.226.129,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGE T	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlasananyakan koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa secara optimal	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	3	3	3	19.504.180,00	3	21674.488,00	3	23.841936,00	3	26.226.129,00	3	26.226.129,00			
	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	1		1		1		1		1				
7.0103.2.010001- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					11655.380,00		12.820.918,00		14.103.009,00		15.513.310,00		15.513.310,00		Moyo Hilir	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	3	3	3	11655.380,00	3	12.820.918,00	3	14.103.009,00	3	15.513.310,00	3	15.513.310,00			
7.0103.2.010002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan					3.456.400,00		4.022.040,00		4.424.244,00		4.866.668,00		4.866.668,00		Moyo Hilir	
Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	1	1	1	3.456.400,00	1	4.022.040,00	1	4.424.244,00	1	4.866.668,00	1	4.866.668,00			
7.0103.2.010003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					4.392.400,00		4.831530,00		5.314.683,00		5.846.151,00		5.846.151,00		Moyo Hilir	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	1	4.392.400,00	1	4.831530,00	1	5.314.683,00	1	5.846.151,00	1	5.846.151,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGE T	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.0103.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					58.171820,00		150.547.452,00		299.489.799,00		519.112.879,00		822.591.439,00			
Terselenggaranya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	9	9	9	58.171820,00	9	150.547.452,00	9	299.489.799,00	9	519.112.879,00	9	822.591.439,00			
	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	9	9	9		9		9		9		9				
	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan (Unit)	2	2	2		2		2		2		2				
7.0103.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan					44.635.220,00		135.657.192,00		283.110.513,00		501.095.666,00		804.574.226,00		Moyo Hilir	
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	9	9	9	44.635.220,00	9	135.657.192,00	9	283.110.513,00	9	501.095.666,00	9	804.574.226,00			
7.0103.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan					4.833.400,00		5.316.740,00		5.848.414,00		6.433.255,00		6.433.255,00		Moyo Hilir	
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	9	9	9	4.833.400,00	9	5.316.740,00	9	5.848.414,00	9	6.433.255,00	9	6.433.255,00			
7.0103.2.03.0003 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan					5.274.500,00		5.801.950,00		6.382.145,00		7.020.359,00		7.020.359,00		Moyo Hilir	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan (Unit)	2	2	2	5.274.500,00	2	5.801.950,00	2	6.382.145,00	2	7.020.359,00	2	7.020.359,00			
7.0103.2.03.0004 - Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					3.428.700,00		3.771.570,00		4.148.727,00		4.563.599,00		4.563.599,00		Moyo Hilir	
Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	1	1	1	3.428.700,00	1	3.771.570,00	1	4.148.727,00	1	4.563.599,00	1	4.563.599,00			
7.0103.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan					46.294.000,00		50.924.060,00		56.016.465,00		61.618.112,00		61.618.112,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGE T	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Meningkatnya Keluarga yang diberdayakan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)	50	50	50	46.294.000,00	50	50.924.060,00	50	56.036.465,00	50	61.638.112,00	50	61.638.112,00			
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	50	50	50		50		50		50		50				
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Keluarga)	50	50	50		50		50		50		50				
7.0103.2.06.0001- Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara					17.600.000,00		19.360.000,00		21.296.000,00		23.425.600,00		23.425.600,00		Moyo Hilir	
Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Keluarga)	50	50	50	17.600.000,00	50	19.360.000,00	50	21.296.000,00	50	23.425.600,00	50	23.425.600,00			
7.0103.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat					16.665.000,00		18.331.500,00		20.164.650,00		22.181.115,00		22.181.115,00		Moyo Hilir	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGE T	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	50	50	50	16.665.000,00	50	18.331.500,00	50	20.164.650,00	50	22.181.115,00	50	22.181.115,00			
7.0103.2.06.0012 - Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas					12.029.000,00		13.232.560,00		14.555.815,00		16.011.397,00		16.011.397,00		Moyo Hilir	
Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)	50	50	50	12.029.000,00	50	13.232.560,00	50	14.555.815,00	50	16.011.397,00	50	16.011.397,00			
7.0104 - PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					116.280.000,00		209.304.000,00		355.816.800,00		569.306.880,00		853.860.320,00			
Terselenggaranya Koordinasi Trantibum di Tingkat Kecamatan Moyo Hilir secara optimal	Tingkat penanganan gangguan trantibum kewilayahan Kecamatan Moyo Hilir (%)	100	100	100	116.280.000,00	100	209.304.000,00	100	355.816.800,00	100	569.306.880,00	100	853.860.320,00	7.010.00.0.00.14.0000 - Kecamatan Moyo Hilir		
7.0104.2.01- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					116.280.000,00		209.304.000,00		355.816.800,00		569.306.880,00		853.860.320,00			
Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	1	1	1	116.280.000,00		209.304.000,00	1	355.816.800,00	1	569.306.880,00	1	853.860.320,00			
	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	1				1		1		1				
7.0104.2.010001- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					96.405.000,00		169.554.000,00		276.316.800,00		450.056.880,00		734.610.320,00		Moyo Hilir	
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	1	96.405.000,00		169.554.000,00	1	276.316.800,00	1	450.056.880,00	1	734.610.320,00			

[illegible]

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGE T	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	50	50	50		50		50		50		50				
7.0105.2.010001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Negara Kesatuan Republik Indonesia					5.757.400,00		6.045.270,00		6.166.175,00		6.289.498,00		6.289.498,00		Moyo Hilir	
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	50	50	50	5.757.400,00	50	6.045.270,00	50	6.166.175,00	50	6.289.498,00	50	6.289.498,00			
7.0105.2.010002 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional					4.400.000,00		4.620.000,00		4.712.400,00		4.806.648,00		4.806.648,00		Moyo Hilir	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGE T	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	50	50	50	4.400.000,00	50	4.620.000,00	50	4.712.400,00	50	4.806.648,00	50	4.806.648,00			
7.0105.2.010003 - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa					2.915.000,00		3.060.750,00		3.152.572,00		3.215.623,00		3.215.623,00		Moyo Hilir	
Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	50	50	50	2.915.000,00	50	3.060.750,00	50	3.152.572,00	50	3.215.623,00	50	3.215.623,00			
7.0105.2.010004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional					257.092.375,00		267.165.486,00		275.370.957,00		280.878.377,00		283.917.520,00		Moyo Hilir	
Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	50	50	50	257.092.375,00	50	267.165.486,00	50	275.370.957,00	50	280.878.377,00	50	283.917.520,00			
7.0105.2.010005 - Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan					3.586.000,00		3.765.300,00		3.840.606,00		3.917.418,00		3.917.418,00		Moyo Hilir	
Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	1	1	1	3.586.000,00	1	3.765.300,00	1	3.840.606,00	1	3.917.418,00	1	3.917.418,00			
7.0105.2.010006 - Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila					4.400.000,00		4.620.000,00		4.712.400,00		4.806.648,00		4.806.648,00		Moyo Hilir	
Berkembangnya Lembaga Masyarakat dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila (Lembaga Masyarakat)	8	8	8	4.400.000,00		4.620.000,00	8	4.712.400,00	8	4.806.648,00	8	4.806.648,00			
7.0106 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					44.916.600,00		62.883.240,00		84.892.374,00		110.360.084,00		137.950.106,00			
Terselenggaranya Binwas Desa di Kecamatan Moyo Hilir	Cakupan Pemdes yang mendapatkan Binwas Kecamatan Moyo Hilir (%)	100	100	100	44.916.600,00	100	62.883.240,00	100	84.892.374,00	100	110.360.084,00	100	137.950.106,00	7.010.00.0.00.14.0000 - Kecamatan Moyo Hilir		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.0106.2.01- Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi					44.916.600,00		62.883.240,00		84.892.374,00		110.360.084,00		137.950.106,00			
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Terselenggaranya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen)	1	1	1	44.916.600,00	1	62.883.240,00	1	84.892.374,00	1	110.360.084,00	1	137.950.106,00			
	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Laporan Fasilitas dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	4	4	4		4		4		4		4				
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	4	4	4		4		4		4		4				
7.0106.2.010001- Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa					5.285.500,00		5.814.050,00		8.721.075,00		11.337.397,00		11.337.397,00		Moyo Hilir	
Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	4	4	4	5.285.500,00	4	5.814.050,00	4	8.721.075,00	4	11.337.397,00	4	11.337.397,00			
7.0106.2.010002 - Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa					4.107.700,00		4.643.450,00		17.557.689,00		9.474.995,00		37.065.017,00		Moyo Hilir	
Terlaksananya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	4	4	4	4.107.700,00	4	4.643.450,00	4	17.557.689,00	4	9.474.995,00	4	37.065.017,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGE T	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.0106.2.010004 - Fasilitas Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan					3.595.900,00		3.955.490,00		5.933.235,00		7.713.205,00		7.713.205,00		Moyo Hilir	
Terlaksananya Fasilitas Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitas dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	1	1	1	3.595.900,00	1	3.955.490,00	1	5.933.235,00	1	7.713.205,00	1	7.713.205,00			
7.0106.2.010006 - Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					0,00		13.350.000,00		0,00		13.350.000,00		13.350.000,00		Moyo Hilir	
Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	1	1	1	0,00	1	13.350.000,00	1	0,00	1	13.350.000,00	1	13.350.000,00			
7.0106.2.010010 - Fasilitas Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan					4.895.000,00		5.384.500,00		8.076.750,00		10.499.775,00		10.499.775,00		Moyo Hilir	
Ditetapkannya Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Fasilitas Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen)	1	1	1	4.895.000,00	1	5.384.500,00	1	8.076.750,00	1	10.499.775,00	1	10.499.775,00			
7.0106.2.010012 - Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan					4.895.000,00		5.384.500,00		8.076.750,00		10.499.775,00		10.499.775,00		Moyo Hilir	
Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)	1	1	1	4.895.000,00	1	5.384.500,00	1	8.076.750,00	1	10.499.775,00	1	10.499.775,00			
7.0106.2.010016 - Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa					22.137.500,00		24.351.250,00		36.526.875,00		47.484.937,00		47.484.937,00		Moyo Hilir	
Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)	1	1	1	22.137.500,00	1	24.351.250,00	1	36.526.875,00	1	47.484.937,00	1	47.484.937,00			

1.3 Uraian Subkegiatan dalam rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Uraian Subkegiatan yang mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah diintegrasikan ke dalam Program Perangkat Daerah, disajikan pada Tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3 Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029

No	Program	Kegiatan	Uraian Subkegiatan		
			Subkegiatan	Uraian Tujuan	Keterangan
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.	Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Ditujukan untuk meningkatkan efektifitas kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.	Pendukung Utama Program Prioritas
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Ditujukan untuk mendukung terlaksananya Urusan pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.	Pendukung Utama Program Prioritas
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Ditujukan untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Pendukung Utama Program Prioritas
			Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Ditujukan untuk mendukung terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Pendukung Utama Program Prioritas
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Ditujukan untuk mendukung terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Pendukung Utama Program Prioritas
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan menuju Keluarga Berkualitas	Ditujukan untuk mendukung terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan menuju Keluarga Berkualitas	Pendukung Utama Program Prioritas

No	Program	Kegiatan	Uraian Subkegiatan		
			Subkegiatan	Uraian Tujuan	Keterangan
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraa n Ketentraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia , Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Untuk Mendukung Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia , Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Pendukung Utama Program Prioritas
4	Program Penyelenggaraa n Urusan pemerintahan Umum	Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan nasional	Untuk mendukung Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan nasional	Pendukung Utama Program Prioritas
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Mendukung Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pendukung Utama Program Prioritas
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan desa dan Peraturan Kepala Desa	Memfasilitasi Penyusunan Peraturan desa dan Peraturan Kepala Desa	Penunjang Program Prioritas
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Memfasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Penunjang Program Prioritas
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Memfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Penunjang Program Prioritas
			Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Memfasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Penunjang Program Prioritas
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Memfasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
6	Prorgram Penunjang Urusan Pemerintah-an Daerah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	Menyusun dokumen perencanaan PD baik tahunan maupun jangka menengah	Penunjang Program Prioritas
			Koordinasi dan	Menyusun	Penunjang

No	Program	Kegiatan	Uraian Subkegiatan		
			Subkegiatan	Uraian Tujuan	Keterangan
			Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen RKA-SKPD sebagai rencana kegiatan dan anggraan.	Program Prioritas
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Menyusun Dokumen Perubahan RKA-SKPD sebagai rencana kegiatan dan anggraan	Penunjang Program Prioritas
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Menyusun DPA-SKPD sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dan anggraan	Penunjang Program Prioritas
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Menyusun Perubahan DPA-SKPD sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dan anggraan	Penunjang Program Prioritas
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Menyusun Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penunjang Program Prioritas
			Evaluasi Kinerja PD	Melaksanakan evaluasi kinerja PD sebagai bahan perencanaan	Penunjang Program Prioritas
		Kegiatan Administrasi Keuangan PD	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Menyediakan Gaji dan Tunjangan ASN	Penunjang Program Prioritas
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Menyediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penunjang Program Prioritas
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Menyusun Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penunjang Program Prioritas
		Administrasi BMD pada PD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BMD SKPD	Menyusun Perencanaan Kebutuhan BMD SKPD	Penunjang Program Prioritas
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD SKPD	Melaksanakan Rekonsiliasi dan Menyusun Laporan BMD SKPD	Penunjang Program Prioritas
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendataan dan Pengolahan Administrasi kepegawaian	Melaksanakan Pendataan dan Pengolahan Administrasi kepegawaian	Penunjang Program Prioritas
			Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Mendukung setiap ASN agar dapat bekerja sesuai target, terukur hasilnya, dan berkontribusi nyata pada pencapaian visi-	Penunjang Program Prioritas

No	Program	Kegiatan	Uraian Subkegiatan		
			Subkegiatan	Uraian Tujuan	Keterangan
				misi daerah	
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Melaksanakan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Penunjang Program Prioritas
		Administrasi Umum PD	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Menyediakan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sesuai kebutuhan	Penunjang Program Prioritas
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Menyediakan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai kebutuhan	Penunjang Program Prioritas
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Menyediakan Peralatan Rumah Tangga sesuai kebutuhan	Penunjang Program Prioritas
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Menyediakan Bahan Logistik Kantor sesuai kebutuhan	Penunjang Program Prioritas
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penunjang Program Prioritas
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Untuk memfasilitasi pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD baik dalam daerah maupun luar daerah oleh pimpinan dan aparatur lainnya.	Penunjang Program Prioritas
		Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemda	Pengadaan Mebel	Penyediaan Mebel Kantor sesuai kebutuhan	Penunjang Program Prioritas
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penyediaan Peralatan dan Mesin Lainnya sesuai kebutuhan	Penunjang Program Prioritas
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Penyediaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sesuai kebutuhan	Penunjang Program Prioritas
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Penyediaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sesuai kebutuhan	Penunjang Program Prioritas
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sesuai kebutuhan	Penunjang Program Prioritas

3	Kategori AKIP PD	Kategori AKIP PD	Kategori	B (60-70)	B (60-70)	B (60-70)	B (60-70)	B (60-70)	B (60-70)	
---	------------------	------------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--

1.5 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui IKK

Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang akan dicapai dalam periode tersebut. IKK digunakan untuk mengukur kinerja perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta berkontribusi pada pencapaian tujuan dan sasaran yang lebih luas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Secara lebih rinci, target kinerja ini dijabarkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. IKK menjadi bagian dari indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran tersebut.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diukur melalui IKK ini diharapkan dapat dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kapasitas keuangan daerah, sumber daya manusia, dan ketersediaan sarana dan prasarana.

IKK menjadi bagian dari indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Table Indikator Kinerja Kunci (IKK)

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	BASE LINE	TARGET TAHUN						KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Kecamatan Moyo Hilir	Poin	72.92	72,22	72,82	73,22	73,83	74,64	81,96	
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Moyo Hilir	Nilai	47.89	64,00	65,00	68,00	70,00	73,00	80,00	
3	Cakupan pelaksanaan pelimpahan urusan pemerintahan dan pelayanan publik Kecamatan Moyo Hilir	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Cakupan LKD/LKK yang mendapatkan pemberdayaan Kecamatan Moyo Hilir	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Tingkat penanganan gangguan	%	100	100	100	100	100	100	100	

	trantibum kewilayahan Kecamatan Moyo Hilir									
5	Cakupan penyelenggaraa n urusan pemerintahan umum tingkat Kecamatan Moyo Hilir	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	Cakupan Pemdes yang mendapatkan Binwas Kecamatan Moyo Hilir	%	100	100	100	100	100	100	100	

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan Penting Substansial

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2025–2029, dalam rangka mendukung pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dokumen ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, memperhatikan kondisi objektif wilayah kecamatan, potensi dan permasalahan aktual, serta merespons isu strategis di tingkat global, nasional, regional, dan lokal.

Visi Pembangunan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025–2029 adalah “Terwujudnya Kabupaten Sumbawa yang Unggul, Maju dan Sejahtera.” Makna dari visi ini adalah pembangunan Kabupaten Sumbawa dilandasi oleh penguatan sumber daya manusia yang unggul, perekonomian yang maju, serta penciptaan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Kecamatan sebagai perangkat daerah yang melaksanakan sebagian urusan pemerintahan umum, kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati, serta fungsi koordinatif kewilayahan, memiliki peran penting dalam memastikan pelaksanaan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di tingkat kecamatan berjalan efektif dan akuntabel.

Oleh karena itu, Renstra Kecamatan Moyo Hilir Tahun 2025–2029 disusun melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan top-down–bottom-up, serta dituangkan ke dalam 6 (enam) program.

Keenam program tersebut dirancang untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah melalui optimalisasi fungsi kecamatan sebagai simpul koordinasi, pelayanan, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di wilayahnya.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan merupakan pedoman operasional dalam pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Moyo Hilir Tahun 2025–2029. Tujuannya adalah untuk memastikan adanya koordinasi yang efektif, kesinambungan program, serta efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan waktu pelaksanaan. Dengan demikian, diharapkan tercipta tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di tingkat kecamatan.

Renstra Kecamatan Moyo Hilir Tahun 2025–2029 menjadi acuan utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan wilayah kecamatan, sekaligus menjadi instrumen untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Keberhasilan implementasi Renstra ini merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Oleh karena itu, dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) sangat diperlukan.

Adapun kaidah pelaksanaan Renstra Kecamatan Moyo Hilir Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan Moyo Hilir wajib melaksanakan program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah dirumuskan dalam Renstra ini secara optimal, sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing.
2. Setiap unit kerja (subbagian dan seksi) harus mensinergikan seluruh kegiatan dan subkegiatan dengan tugas pokok dan fungsi serta berpedoman pada dokumen Renstra Kecamatan ini.
3. Penjabaran lebih lanjut dari Renstra Kecamatan Moyo Hilir dilakukan setiap tahun melalui penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Moyo Hilir.
4. Penyusunan Renja Kecamatan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumbawa, yang dirumuskan melalui tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, forum perangkat daerah, hingga Musrenbang tingkat kabupaten.

Renstra Kecamatan ini menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Moyo Hilir, serta menjadi rujukan dalam penyusunan perjanjian kinerja (PK) antara Camat dan kepala unit kerja (subbagian/seksi), serta seluruh aparatur secara berjenjang.

5.3 Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah

Untuk menjaga konsistensi dan efektivitas pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Moyo Hilir Tahun 2025–2029, Camat Moyo Hilir bersama seluruh jajaran melakukan pengendalian dan evaluasi secara berkala terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Moyo Hilir. Pengendalian dan evaluasi ini dilaksanakan dalam jangka waktu triwulan, semesteran, dan tahunan, serta hasilnya dilaporkan secara berjenjang kepada Bupati Sumbawa melalui Dinas terkait.

Dalam rangka menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sumbawa, serta mengantisipasi kekosongan dokumen Rencana Kerja (Renja) setelah berakhirnya periode Renstra ini—sebagai dampak dari berakhirnya periode RPJMD—langkah-langkah berikut perlu dilakukan:

1. Renstra Kecamatan Moyo Hilir ini dijadikan pedoman utama dalam penyusunan Renja masa transisi.
2. Renstra sebagai pedoman pada butir (1) bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan yang belum seluruhnya terselesaikan sampai akhir periode Renstra ini, serta mengantisipasi permasalahan pembangunan yang akan dihadapi pada tahun pertama masa pemerintahan periode berikutnya.

Dengan memperhatikan kaidah-kaidah tersebut, Renstra-PD Tahun 2025–2029 ini diharapkan mampu menjadi dokumen perencanaan yang efektif, responsif, dan akuntabel dalam mendukung pencapaian target kinerja perangkat daerah. Melalui optimalisasi pelaksanaan program dan

kegiatan yang tersusun secara sistematis, diharapkan akan tercapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam lima tahun ke depan. Selanjutnya, pelaksanaan Renstra-PD ini akan mendorong terbentuknya tata kelola anggaran yang lebih akuntabel, transparan, dan berbasis hasil, serta memperkuat kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih akurat sesuai dengan kewenangan perangkat daerah

BUPATI SUMBAWA,

SYARAFUDDIN JAROT